



0

DESAIN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL

*PROVINSI JAWA BARAT MENUJU
PARIWISATA BERKELANJUTAN*

Disusun oleh

*Dr. Alvien Septian Haerisma, MSI
Abdul Ghoni, MA*

DESAIN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL PROVINSI JAWA BARAT MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN

Dr. Alvien Septian Haerisma, MSI

Abdul Ghoni, MA



DESAIN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL PROVINSI JAWA BARAT MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN

Dr. Alvien Septian Haerisma, MSI
Abdul Ghoni, MA



CAHAYA SMART NUSANTARA

DESAIN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL PROVINSI JAWA BARAT MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN

copyright © Desember 2024

penulis : Dr. Alvien Septian Haerisma, MSI
Abdul Ghoni, MA
editor : Alvien Septian Haerisma
Setting dan layout : Abdul Ghoni
desain cover : Abdul Ghoni
link : <https://cahayasmartnusantara.my.id/>
ISBN : 978-623-89200-5-1

Hak Penerbitan ada pada © Cahaya Smart Nusantara @2024

Hakcipta © 2024 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14 cm x 20,5 cm

Halaman : vii + 150 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening media
Publishing

Cetakan I, Desember 2024



Anggota IKAPI: 490/JBA/2024

Website: <https://cahayasmartnusantara.my.id/>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *"Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Menuju Pariwisata Berkelanjutan"* dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pariwisata halal semakin mendapat perhatian luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Pariwisata halal tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang mencakup kelestarian lingkungan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, buku ini disusun untuk memberikan panduan praktis dan strategis dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang selaras dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan buku ini, baik berupa informasi, saran, maupun masukan yang sangat berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi pada pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Pendahuluan.....	1
Potensi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat	6
Profil Daerah Provinsi Jawa Barat.....	12
Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat	24
Kriteria dan Standar Destinasi Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Daya Saing	27
Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat	30
Implementasi Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Menuju Pariwisata Keberlanjutan	32
Konsep Pariwisata Halal	32
Dampak Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal terhadap Pariwisata Berkelanjutan	69
Tantangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Dan Strategi Untuk Mencapai Pariwisata Berkelanjutan	74
Daftar Pustaka.....	78

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi dengan populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan pasar yang potensial bagi industri pariwisata halal. Pada tahun 2021 pariwisata halal Indonesia berada di peringkat keempat dan kedua pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Indonesia meraih posisi rangking pertama dalam Mastercard- CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura (Sayuti, 2023). Prestasi dalam GMTI tersebut seyogyanya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan global (Lahny, 2019). Pariwisata halal di Indonesia telah menjadi tren yang berkembang, seiring dengan kampanye pemerintah Indonesia The Halal Wonders yang berdampak positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan muslim maupun dana pengeluarannya dalam berwisata (Winarti, 2017).

Data tahun 2022, terdapat 110 juta wisatawan muslim internasional menyumbang 12% dari seluruh kunjungan wisatawan internasional. Jumlah wisatawan muslim meningkat sekitar 140 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan bertambah sebesar 160 juta pada tahun 2024. Kunjungan wisatawan secara global diprediksi mengalami peningkatan mencapai 230 juta pada tahun 2028 dengan perkiraan pengeluaran sebesar USD 225 Miliar (GMTI Report, 2023).

Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia pun telah memperkenalkan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas dalam industri pariwisata halal. IMTI berupaya untuk meningkatkan indeks daya saing destinasi dan industri pariwisata halal secara keseluruhan. IMTI menggunakan kerangka ACES dari CrescentRating, yang digunakan dalam GMTI, untuk menilai setiap provinsi di Indonesia mengenai pariwisata halal (IMTI Report, 2023).

Hasil Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 memberikan penilaian kesiapan dan daya tarik lima belas provinsi berbeda yang memiliki potensi destinasi wisatawan muslim di Indonesia. IMTI telah memberikan skor untuk meningkatkan daya tarik pariwisata halal untuk masing-masing provinsi dengan berfokus pada domain Akses (Access), Komunikasi (Communication), Lingkungan (Environment) dan Layanan (Service). Data yang disajikan 10 provinsi teratas, sebagai berikut:

Provinsi	IMTI 2023 Score	IMTI 2023 Rank
Nusa Tenggara Barat	67	1
Aceh	63	2
Sumatera Barat	62	3
DKI Jakarta	60	4
Jawa Tengah	59	5
Jawa Barat	56	6
DI Yogyakarta	53	7
Jawa Timur	52	8
Sulawesi Selatan	51	9
Kalimantan Selatan	49	10

Sumber: IMTI Report, 2023

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat yaitu peraturan pemerintah, pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda, 2020). Tantangan lainnya masih belum optimalnya penyedia layanan bagi para wisatawan oleh pihak stakeholder yang berwenang. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, wilayah provinsi Jawa Barat ini berpotensi menjadi tujuan wisata halal terkemuka, dengan populasi muslim yang kuat dan dukungan

pemerintah (Qory,dkk, 2021). Namun terdapat kesenjangan antara persepsi dan preferensi wisatawan terhadap pariwisata halal di wilayah tersebut (Siregar, 2018). Konsep pariwisata halal di Jawa Barat baru menekankan pada makanan dan fasilitas yang sesuai syariah, namun implementasinya masih dalam proses perbaikan (Zaenuri, dkk, 2021).

Pariwisata berkelanjutan merupakan isu kompleks bagi pemegang kepentingan yang bertujuan untuk menstimulasi eksploitasi sumber daya alam secara seimbang pada tingkat lokal dan pembatasan sosial dan dampak lingkungan (Battaglia, 2017; Rasyid, 2019). Perkembangan pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu industri unggulan perekonomian negara memerlukan perencanaan yang tepat dan tantangan seperti keselamatan, mobilitas, dan aksesibilitas lanjutan untuk menjaga keberlanjutannya (Peristiwo, 2021).

Berbagai tinjauan literatur ini menyoroti hubungan pengembangan destinasi pariwisata halal dengan pariwisata berkelanjutan. Selain itu hubungan antara nilai-nilai sosial, jasa pariwisata, dan ketentuan Islam sebagai peta jalan ke depan untuk pembahasan dan pengembangan industri pariwisata halal yang berkelanjutan.

Konsep Dasar Pariwisata Halal

1. Destinasi Pariwisata Halal

Peluang pasar dan persaingan pariwisata halal di dunia menyebabkan setiap negara, kota, dan daerah mempersiapkan dan memetakan sebuah destinasi yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Maka menurut Ibrahim Kudsi dan Puspita (2018) diperlukan destination branding menjadi sebuah cara membedakan tujuan wisata/daya tarik terlihat unik dengan para pesaingnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muchamad Zaenuri, dkk (2022) salah satu cara untuk memperkenalkan potensi destinasi dengan pemeliharaan di dalamnya terdapat fasilitas, infrastruktur, layanan dan keamanan dalam lingkungan obyek wisata tersebut.

Dalam perspektif syariah, diperjelaskan bahwa destinasi sebagai tempat tujuan wisata harus sesuai dalam nilai syariah. Nilai-nilai syariah dalam suatu destinasi wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat juga kemaksiatan, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba serta judi (Fatwa DSN, 2016).

Konsep pengembangan destinasi terdiri dari atribut-atribut destinasi pariwisata yang telah dipaparkan oleh (Andrianto dan Sugijama, 2016) dan (Zaenuri, dkk, 2022) menjabarkan terdapat 4 komponen, yaitu: Atraksi atau Daya Tarik (Tourism Attractions), Aksesibilitas (Accessibilities), Fasilitas (Amenity), Layanan Pendukung (Ancillary). Destinasi merupakan unsur utama dalam pembangunan obyek wisata karena dijadikan daya tarik suatu daerah tujuan wisata (Islam dan Rohman, 2019). Gagasan lain oleh (Ardiansyah dan Fortuna, 2020) mengungkapkan bahwa destinasi menjadi hal penting dan sangat dominan untuk mengambil perhatian para wisatawan yang akan datang ke objek wisata yang disajikan suatu daerah.

Destinasi sebagai modal atau sumber daya pariwisata yang tidak dapat ditiru dan disamakan karena memiliki karakteristik tersendiri antara satu destinasi dengan lainnya.

Destinasi yang ditampilkan berhubungan dengan keunikan, keindahan, keunggulan dari objek wisata tersebut. Potensi destinasi dibagi 3 macam, di antaranya: (1) Daya tarik wisata alam (natural attraction) meliputi pemandangan alam lautan, gunung, danau, pantai, iklim, dan ciri khas geografis lainnya, (2) Daya tarik wisata budaya (cultural attraction) meliputi bangunan tempo dulu, situs bersejarah, arsitektur bangunan, tari-tarian (dance), kegiatan unik dalam kultur masyarakat dan berbagai kuliner dan (3) Daya tarik wisata buatan manusia (social attraction) sebagai atraksi buatan seperti gaya hidup, bahasa lokal, event olahraga, berbelanja, pameran, serta kegiatan sehari-hari (Zaenuri, dkk, 2022 dan Sunaryo, 2013).

2. Pariwisata Berkelanjutan

Kebijakan pariwisata berkelanjutan menentukan kerangka kerja yang menentukan tujuan, sasaran, prioritas dan tindakan pariwisata nasional secara ekonomi, sosiokultural, budaya, politik dan lingkungan yang akan menjadi landasannya perkembangan masa depan pariwisata di daerah tujuan (Wahab, 1997). Industri pariwisata berkelanjutan menjalankan korelasi antara profitabilitas dan pelestarian alam, sejarah dan warisan budaya lokal. Fitur-fitur ini sebagai syarat bisnis yang dapat berkontribusi pada peningkatan sumber daya dan pemeliharaan warisan budaya serta menjamin tingkat pariwisata yang tinggi untuk menunjang kelangsungan hidup dan profitabilitas perusahaan (Battaglia, M, 2017).

Potensi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal karena kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, kebutuhan akan destinasi yang mendukung pariwisata halal menjadi semakin signifikan. Peningkatan permintaan wisata halal di tingkat global juga mendorong pengembangan ini, sejalan dengan tren pariwisata berkelanjutan yang semakin banyak diterapkan oleh destinasi di seluruh dunia (Henderson, 2016).

1. Peningkatan Permintaan Wisata Halal Global

Secara global, wisata halal telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, dengan estimasi pasar mencapai lebih dari USD 220 miliar pada 2020 dan terus meningkat (DinarStandard, 2020). Kebutuhan wisatawan Muslim yang lebih terfokus pada produk dan layanan halal menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi potensial yang dapat menawarkan pengalaman wisata yang aman dan nyaman, terutama dengan populasi Muslim yang besar dan kultur Islam yang kuat (Rahman & Zailani, 2017).

2. Posisi Strategis Jawa Barat dalam Pariwisata Halal

Jawa Barat memiliki posisi strategis dengan kedekatannya dengan Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Provinsi ini menjadi pintu gerbang bagi wisatawan domestik dan internasional. Potensi ini menjadi salah satu keuntungan komparatif bagi Jawa Barat dalam mengembangkan wisata halal, karena mudah diakses dari berbagai penjuru dunia, termasuk negara-negara mayoritas Muslim di Asia dan Timur Tengah (Oktadiana et al., 2020).

3. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Wisata Halal

Budaya Sunda yang mendominasi masyarakat Jawa Barat dikenal dengan prinsip "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh," yang mencerminkan sikap toleransi dan kearifan lokal yang mendukung konsep wisata halal. Tradisi ini dapat dijadikan modal sosial dalam pengembangan destinasi wisata halal yang berbasis komunitas, serta dapat dikombinasikan dengan prinsip keberlanjutan dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan (Nugraha & Azis, 2021).

4. Infrastruktur Pendukung Wisata Halal

Salah satu faktor penting dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung, seperti tempat ibadah, hotel dengan sertifikasi halal, dan restoran halal. Sejumlah destinasi wisata populer di Jawa Barat seperti Bandung, Garut, dan Bogor telah mulai menyediakan fasilitas tersebut, namun pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan Muslim internasional (Sahida et al., 2019).

5. Destinasi Wisata Alam sebagai Daya Tarik Halal

Jawa Barat terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pegunungan, pantai, hingga air terjun. Destinasi seperti Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan Pantai Pangandaran memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata halal yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, budaya, dan religiusitas (Battour et al., 2018). Pendekatan ini juga dapat memikat segmen wisatawan Muslim yang mencari pengalaman alam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Pengembangan Wisata Kuliner Halal di Jawa Barat

Kuliner merupakan salah satu aspek penting dalam wisata halal. Jawa Barat, dengan kekayaan kulinernya seperti nasi timbel, pepes ikan, dan aneka makanan berbahan dasar ikan dan sayuran, memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan

Muslim dengan menyediakan kuliner halal. Pengembangan lebih lanjut dalam hal sertifikasi halal dan promosi produk-produk lokal yang aman dikonsumsi menurut hukum syariah akan menjadi kunci penting dalam pengembangan ini (Samori et al., 2016).

7. Penguatan Sistem Sertifikasi Halal

Salah satu tantangan dalam pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat adalah penguatan sistem sertifikasi halal. Sertifikasi yang mencakup hotel, restoran, serta destinasi wisata perlu ditingkatkan agar wisatawan Muslim merasa nyaman dan yakin dengan pilihan mereka. Standar sertifikasi yang sesuai dengan pedoman internasional akan membantu meningkatkan daya saing Jawa Barat dalam pasar wisata halal (Zulkifli et al., 2020).

8. Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta

Pemerintah daerah Jawa Barat telah mulai menyadari pentingnya sektor pariwisata halal dalam mendorong perekonomian lokal. Kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas, akomodasi, dan promosi wisata halal diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini. Contoh kolaborasi sukses bisa dilihat pada beberapa negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah mengembangkan pariwisata halal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Henderson, 2016).

9. Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Halal

Untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, pendidikan dan pelatihan khusus bagi pelaku industri pariwisata sangat penting. Pelatihan ini bisa mencakup pengetahuan tentang kebutuhan wisatawan Muslim, standar layanan halal, dan bagaimana mengelola destinasi sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Program pendidikan ini dapat diberikan melalui lembaga pendidikan tinggi pariwisata di Jawa

Barat, yang nantinya akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang ini (Samori et al., 2016).

10. Potensi Desa Wisata Berbasis Halal

Pengembangan desa wisata berbasis halal di Jawa Barat menjadi salah satu strategi yang menarik. Desa-desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya, alam, dan kehidupan sehari-hari yang Islami, seperti Desa Ciburial di Lembang, dapat menjadi model destinasi wisata halal yang autentik. Pendekatan ini juga akan membantu dalam pelestarian budaya dan lingkungan setempat (Oktadiana et al., 2020).

11. Wisata Religi sebagai Bagian dari Pariwisata Halal

Jawa Barat memiliki sejumlah situs religi yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, seperti Masjid Raya Bandung dan pesantren-pesantren besar di Garut dan Tasikmalaya. Wisata religi ini dapat menjadi bagian dari paket wisata halal yang menggabungkan ziarah, wisata alam, dan budaya (Zulkifli et al., 2020).

12. Pengaruh Wisata Halal terhadap Ekonomi Lokal

Pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat memiliki dampak langsung terhadap ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim, daerah-daerah di Jawa Barat dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan (Rahman & Zailani, 2017).

13. Tantangan Pemasaran Pariwisata Halal Jawa Barat

Meskipun memiliki potensi besar, pariwisata halal di Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam hal pemasaran. Destinasi ini perlu dipromosikan lebih intensif di negara-negara

Muslim seperti Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara Asia lainnya yang memiliki populasi Muslim besar. Penggunaan media digital dan platform pariwisata halal dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ini (Sahida et al., 2019).

14. Tren Wisata Halal di Kalangan Generasi Milenial

Generasi milenial Muslim merupakan segmen pasar yang signifikan dalam wisata halal. Mereka lebih cenderung mencari pengalaman otentik, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jawa Barat, dengan kekayaan alam dan budayanya, dapat memenuhi kebutuhan ini dengan mengembangkan destinasi-destinasi yang ramah milenial dan memenuhi standar halal (Oktadiana et al., 2020).

15. Peran Teknologi dalam Pengembangan Pariwisata Halal

Teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat. Penggunaan aplikasi wisata halal yang memudahkan wisatawan Muslim dalam menemukan fasilitas halal, jadwal shalat, dan arah kiblat akan sangat membantu. Penerapan teknologi juga mendukung promosi dan pemasaran destinasi secara lebih luas dan efektif (Zulkifli et al., 2020).

16. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Infrastruktur yang ramah lingkungan, manajemen sampah yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian lingkungan (Battour et al., 2018).

17. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memainkan peran strategis dalam pengembangan pariwisata halal, terutama dalam hal regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang mendukung investasi di sektor ini, termasuk insentif bagi pengusaha yang

mengembangkan bisnis wisata halal, akan mempercepat pertumbuhan sektor tersebut (Henderson, 2016).

18. Komitmen terhadap Keberlanjutan

Pariwisata halal di Jawa Barat tidak hanya tentang menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga tentang komitmen terhadap pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mencakup konservasi lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pengembangan destinasi halal berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan (Nugraha & Azis, 2021).

Dengan potensi alam, budaya, dan dukungan infrastruktur, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata halal terkemuka di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, akan menjadi kunci sukses dalam pengembangan sektor ini (Rahman & Zailani, 2017).

Profil Daerah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 35.377,76 km². Wilayah ini terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dan kawasan pesisir, sehingga menjadikannya salah satu provinsi yang kaya akan keragaman geografi dan sumber daya alam. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan dalam hal perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya yang seimbang.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di sebelah barat, yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda juga menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu jalur lalu lintas penting di Indonesia. Wilayahnya dikelilingi oleh laut di sebelah utara dan selatan, yang mencakup Laut Jawa dan Samudera Hindia.

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa provinsi lainnya serta wilayah perairan. Di sebelah utara, Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa, yang menjadi pintu masuk bagi perdagangan maritim di Indonesia. Di sebelah timur, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang memisahkan dua wilayah ini oleh sungai-sungai besar dan pegunungan. Di sebelah selatan, Jawa Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, menjadikannya rentan terhadap dinamika iklim laut dan perikanan. Di sebelah barat, Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Jawa Barat memiliki topografi yang beragam, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan. Pegunungan yang terkenal, seperti Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Ciremai, merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat. Di samping itu, terdapat juga dataran rendah di wilayah pesisir utara yang mendukung pertanian, dan

pantai selatan yang dikenal dengan ombak besar dan kawasan pariwisata alam. Keragaman topografi ini memberikan dampak terhadap pola pemukiman, ekonomi, dan infrastruktur di provinsi ini.

Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 27 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten terluas di provinsi ini. Kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Bekasi, dan Depok juga merupakan bagian penting dari struktur administrasi provinsi ini. Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda-beda, yang mendukung keberagaman ekonomi di Jawa Barat, termasuk sektor industri, pariwisata, dan pertanian.

Dengan kedekatannya dengan DKI Jakarta, Jawa Barat menjadi pusat bagi banyak kawasan industri, khususnya di wilayah utara dan barat. Kawasan-kawasan seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang telah berkembang menjadi pusat industri yang memproduksi berbagai macam barang mulai dari elektronik hingga otomotif. Keberadaan infrastruktur yang baik, seperti akses jalan tol dan pelabuhan, mendukung pengembangan kawasan industri ini, yang juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberagaman wilayah di Jawa Barat juga menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir menghadirkan berbagai masalah lingkungan seperti erosi, banjir di dataran rendah, dan degradasi lahan di wilayah pertanian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk mengelola tantangan ini melalui kebijakan tata ruang yang berfokus pada pengelolaan wilayah yang lebih berkelanjutan.

Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Letak astronomisnya berada di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Provinsi ini berada di dekat pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, yaitu DKI Jakarta, yang menjadikannya sebagai salah satu pusat kegiatan

ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Secara geografis, Jawa Barat berbatasan dengan sejumlah wilayah penting di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah administratif Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah utara Jawa Barat sebagian besar terdiri dari dataran rendah pesisir yang dikenal dengan kegiatan agrarisnya, serta menjadi pintu gerbang bagi perdagangan maritim melalui beberapa pelabuhan penting. Kawasan utara juga meliputi wilayah metropolitan seperti Bekasi, Karawang, dan Cirebon.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Batas timur ini dipisahkan oleh aliran sungai dan daerah pegunungan yang menjadi pembatas alami antara dua provinsi tersebut. Jawa Barat dan Jawa Tengah juga berbagi beberapa tradisi dan budaya yang serupa, meskipun memiliki variasi dialek bahasa dan adat.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia. Bagian selatan Jawa Barat memiliki garis pantai yang panjang dengan berbagai destinasi wisata alam seperti Pantai Pangandaran dan Pantai Ujung Genteng. Wilayah ini juga rentan terhadap dinamika kelautan dan bencana alam seperti tsunami, mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan perairan luas.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Di sebelah barat, Jawa Barat terhubung dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, menjadikannya salah satu koridor terpenting dalam pergerakan ekonomi dan manusia antara ibu kota dan daerah sekitarnya. Batas ini juga mencakup kawasan perkotaan besar seperti Bogor dan Depok yang termasuk dalam wilayah penyangga Jakarta.

Secara topografi, Jawa Barat didominasi oleh pegunungan di wilayah tengah dan selatan, sementara wilayah utara sebagian besar merupakan dataran rendah. Pegunungan di Jawa Barat, seperti Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Ciremai, memainkan peran penting dalam pengendalian iklim serta distribusi sumber daya air di provinsi ini. Kondisi geografis yang

bervariasi ini mempengaruhi pola pemukiman, pertanian, dan infrastruktur di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, memiliki iklim tropis dengan dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh pola angin muson, yang menyebabkan perubahan cuaca antara kedua musim tersebut. Selama 5 tahun terakhir, iklim di Jawa Barat menunjukkan variasi yang signifikan, terutama terkait dengan dampak perubahan iklim global yang semakin nyata.

Curah hujan di Jawa Barat bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya. Wilayah pegunungan, seperti Bogor dan Bandung, menerima curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir utara. Rata-rata curah hujan tahunan di Jawa Barat berkisar antara 2.000 hingga 4.000 mm, dengan wilayah Bogor tercatat sebagai salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, curah hujan menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan tahun-tahun seperti 2019 dan 2021 mengalami intensitas hujan yang lebih tinggi, sementara tahun 2020 lebih kering dibandingkan rata-rata. Curah hujan yang tinggi ini sering kali menyebabkan banjir di beberapa wilayah, terutama di dataran rendah seperti Karawang dan Bekasi (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2023).

Suhu di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan sedikit peningkatan, sesuai dengan tren pemanasan global yang diamati di banyak bagian dunia. Suhu rata-rata di dataran rendah seperti Cirebon dan Bekasi berkisar antara 25°C hingga 34°C, sedangkan di daerah pegunungan seperti Lembang dan Puncak, suhu lebih sejuk dengan kisaran 18°C hingga 26°C. Peningkatan suhu tahunan yang terus-menerus, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bogor, dipengaruhi oleh urbanisasi dan efek pulau panas perkotaan (*urban heat island*). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, suhu di beberapa kota di Jawa Barat lebih tinggi sekitar 1,5°C dibandingkan dengan rata-rata 30 tahun terakhir (BMKG, 2023).

Musim kemarau di Jawa Barat umumnya terjadi antara bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan berlangsung dari Oktober hingga April. Namun, dalam lima tahun terakhir, pola musim ini cenderung mengalami pergeseran. Musim kemarau pada tahun 2020, misalnya, berlangsung lebih lama dan menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah seperti Indramayu dan Cirebon, yang berdampak pada sektor pertanian. Sebaliknya, musim hujan pada tahun 2021 dimulai lebih awal dengan intensitas yang tinggi, menyebabkan banjir di sejumlah daerah (Asian Disaster Preparedness Center, 2021).

Jawa Barat juga mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem dalam lima tahun terakhir, termasuk hujan lebat yang tiba-tiba, banjir bandang, dan angin puting beliung. Pada tahun 2021, wilayah Bogor dan Sukabumi mengalami banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrem dalam waktu singkat. Fenomena La Niña yang terjadi pada 2020 dan 2021 juga mempengaruhi cuaca di Jawa Barat, menyebabkan peningkatan curah hujan yang jauh di atas normal, terutama pada bulan-bulan puncak musim hujan (BMKG, 2021).

Perubahan iklim telah mulai mempengaruhi pola cuaca di Jawa Barat, dengan periode musim hujan yang tidak menentu dan cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Kenaikan permukaan air laut juga mengancam wilayah pesisir utara Jawa Barat, termasuk kawasan industri dan pertanian di Karawang dan Subang. Peningkatan suhu dan variabilitas iklim juga berdampak pada produksi pangan dan kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan peningkatan penyakit tropis seperti demam berdarah yang cenderung mewabah pada musim hujan (World Meteorological Organization, 2022).

Melihat tren iklim selama 5 tahun terakhir, Jawa Barat diproyeksikan akan mengalami peningkatan suhu lebih lanjut dan cuaca yang semakin tidak menentu. BMKG telah menyarankan peningkatan kesiapan masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana alam terkait iklim, seperti banjir dan kekeringan. Pemerintah daerah juga didorong

untuk meningkatkan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah (BMKG, 2023).

Peta Topografi di Provinsi Jawa Barat Selama 5 Tahun Terakhir. Topografi Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan keanekaragaman lanskap yang khas dan penting bagi berbagai sektor, termasuk pertanian, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam. Secara umum, topografi Jawa Barat terbagi menjadi tiga zona utama: dataran rendah di utara, pegunungan di bagian tengah dan selatan, serta garis pantai yang membentang di sepanjang pesisir selatan dan utara.

Bagian utara Jawa Barat sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang membentang dari kawasan Bekasi hingga Cirebon. Wilayah ini berada pada ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut dan sangat cocok untuk pertanian, terutama sawah dan perkebunan. Daerah utara Jawa Barat juga merupakan kawasan industri dan perkotaan yang sangat berkembang, terutama di Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan industri dan infrastruktur di kawasan ini telah memengaruhi struktur penggunaan lahan, dengan peningkatan pesat pembangunan kawasan industri dan perumahan.

Sebagian besar wilayah tengah dan selatan Jawa Barat adalah daerah pegunungan, yang mencakup beberapa gunung aktif seperti Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Ciremai, dan Gunung Papandayan. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Peta topografi dari Badan Geologi Indonesia menunjukkan bahwa wilayah pegunungan di Jawa Barat merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Selama lima tahun terakhir, berbagai program mitigasi bencana telah diterapkan untuk mengurangi risiko, termasuk reboisasi dan pembangunan terasering di daerah-daerah rawan longsor.

Jawa Barat memiliki dua garis pantai yang penting: pesisir utara yang membentang di sepanjang Laut Jawa dan pesisir selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Pesisir utara, yang relatif lebih datar, banyak digunakan untuk aktivitas maritim dan pelabuhan, seperti di Cirebon dan Indramayu. Di sisi lain, pantai selatan lebih berbukit dan memiliki topografi yang lebih curam, dengan beberapa pantai wisata populer seperti Pantai Pangandaran dan Pantai Ujung Genteng. Peta topografi kawasan selatan ini menunjukkan bahwa wilayah ini berisiko mengalami erosi pantai akibat aktivitas gelombang tinggi dari Samudera Hindia. Beberapa studi lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan erosi di daerah pesisir selatan, yang mengakibatkan hilangnya lahan dan mempengaruhi pemukiman di dekat pantai.

Jawa Barat juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling aktif secara geologis di Indonesia. Aktivitas vulkanik dari gunung berapi seperti Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Papandayan secara signifikan memengaruhi topografi provinsi ini. Erupsi vulkanik selama lima tahun terakhir, meskipun tidak selalu besar, telah menyebabkan perubahan kecil dalam morfologi gunung serta pembentukan danau kawah dan aliran lava baru. Selain itu, pergerakan lempeng tektonik di Jawa Barat bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia menjadikan wilayah ini rawan terhadap gempa bumi tektonik, yang dapat memicu perubahan topografi lokal seperti pergeseran tanah dan likuifaksi.

Perubahan iklim juga telah memengaruhi pola erosi tanah dan degradasi lingkungan di Jawa Barat, terutama di kawasan dataran tinggi dan daerah aliran sungai. Peta topografi terbaru menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap erosi di daerah pegunungan akibat intensitas curah hujan yang semakin tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini berdampak pada pola aliran sungai dan kualitas tanah, terutama di wilayah yang digunakan untuk pertanian dan permukiman.

Peta topografi memainkan peran penting dalam perencanaan tata ruang di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

menggunakan data topografi yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Geologi untuk merancang kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir, peta topografi telah digunakan untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi pengembangan infrastruktur, kawasan wisata, serta mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan longsor dan banjir.

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dan beragam, terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir. Struktur geologi Jawa Barat didominasi oleh pegunungan vulkanik yang membentang dari barat ke timur, seperti Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Selatan, yang terbentuk dari aktivitas tektonik dan vulkanik. Aktivitas geologi ini juga menjadikan wilayah Jawa Barat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Pada lima tahun terakhir, fenomena geologi ini semakin disorot, terutama terkait dengan mitigasi bencana (Tjia, 2020).

Jawa Barat dikenal sebagai wilayah dengan gunung-gunung berapi aktif, seperti Gunung Gede, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Papandayan. Aktivitas vulkanik ini mempengaruhi kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya, dengan potensi letusan yang bisa mempengaruhi populasi di sekitarnya. Salah satu fenomena penting yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah peningkatan aktivitas di Gunung Tangkuban Perahu, yang pada 2019 sempat mengalami erupsi ringan yang menyebabkan ditutupnya beberapa destinasi wisata di sekitarnya untuk sementara waktu (Geological Agency Indonesia, 2019). Letusan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem pemantauan vulkanik di wilayah tersebut.

Jawa Barat juga terletak di zona tektonik yang aktif karena posisinya berada di dekat pertemuan dua lempeng utama: Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Zona subduksi ini menyebabkan seringnya terjadi gempa bumi di wilayah Jawa Barat. Dalam lima tahun terakhir, tercatat beberapa kali gempa dengan magnitudo sedang hingga tinggi, seperti gempa

Tasikmalaya pada Desember 2017 yang mencapai magnitudo 6,9. Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur di beberapa daerah (Hermanto & Nugroho, 2020).

Selain dari segi bencana, kondisi geologi Jawa Barat juga mendukung potensi sumber daya alam yang signifikan. Provinsi ini memiliki cadangan energi panas bumi yang besar, terutama di kawasan Pangalengan, Kamojang, dan Wayang Windu, yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dalam lima tahun terakhir, pengembangan energi panas bumi di Jawa Barat semakin meningkat dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk mendukung ketahanan energi nasional (Utama, 2019).

Salah satu fenomena geologi yang paling sering terjadi di Jawa Barat adalah tanah longsor, terutama di daerah pegunungan dan lereng yang curam. Tanah longsor sering kali dipicu oleh curah hujan tinggi yang melemahkan struktur tanah. Daerah seperti Bogor, Sukabumi, dan Garut menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan longsor yang tinggi. Menurut kajian dari Badan Geologi Indonesia (2021), insiden longsor di Jawa Barat meningkat selama periode musim hujan, dan mitigasi longsor menjadi perhatian utama pemerintah setempat, terutama dengan pendekatan penggunaan teknologi pemetaan berbasis GIS untuk memetakan area rawan longsor (Nugroho & Riyanto, 2021).

Bagian selatan Jawa Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, yang menjadikan kawasan pesisir selatan terpengaruh oleh aktivitas tektonik bawah laut. Zona subduksi di Samudera Hindia menjadi penyebab terjadinya gempa bumi bawah laut yang memicu gelombang tsunami, seperti yang pernah terjadi di wilayah Pangandaran pada 2006. Dalam lima tahun terakhir, pembahasan geologi laut di pesisir selatan Jawa Barat semakin berkembang, dengan fokus pada pemetaan bawah laut untuk memahami dinamika tektonik serta mitigasi risiko tsunami (Darman & Sidi, 2017).

Pegunungan Selatan Jawa Barat merupakan hasil dari evolusi tektonik yang kompleks selama jutaan tahun.

Pembahasan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa proses tektonik di kawasan ini terus berlanjut, dengan adanya indikasi pergerakan lempeng yang memicu terbentuknya patahan-patahan baru di wilayah tersebut (Setiawan et al., 2020). Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada dinamika gempa bumi, tetapi juga mempengaruhi distribusi mineral dan potensi energi di wilayah tersebut.

Penggunaan teknologi modern seperti citra satelit dan pemodelan tiga dimensi (3D) semakin banyak diterapkan dalam lima tahun terakhir untuk pemetaan geologi di Jawa Barat. Teknologi ini digunakan untuk memetakan potensi risiko geologi, seperti tanah longsor, zona rawan gempa, dan area yang berpotensi untuk pengembangan energi panas bumi. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi remote sensing untuk memantau aktivitas vulkanik dan mendeteksi perubahan morfologi gunung berapi (Aji et al., 2020).

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Provinsi Jawa Barat merupakan area yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata utama. Penetapan KSPD ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut serta untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di provinsi ini. Jawa Barat dengan kekayaan alam seperti pegunungan, pantai, danau, serta warisan budaya yang beragam memiliki sejumlah kawasan yang ditetapkan sebagai KSPD untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah (Haryanto, 2020).

KSPD adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi pariwisata dan daya tarik yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Penetapan ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti potensi ekonomi, keunikan alam atau budaya, serta kemampuan kawasan tersebut dalam menarik wisatawan. Di Jawa Barat, kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai KSPD mencakup berbagai jenis destinasi, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi (Kementerian Pariwisata, 2021).

Menurut Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), penetapan KSPD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama. Kriteria tersebut mencakup potensi pariwisata, keunikan alam dan budaya, daya tarik bagi wisatawan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, kawasan yang masuk dalam kategori KSPD juga harus memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi yang berdaya saing nasional dan internasional (Suharto, 2019).

Jawa Barat memiliki beberapa KSPD yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Kawasan Puncak - Bogor: Kawasan ini dikenal dengan pemandangan alam pegunungan dan perkebunan teh yang indah. Puncak juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik dan internasional, terutama karena letaknya yang dekat dengan Jakarta.
- 2) Kawasan Pangandaran: Terletak di pesisir selatan Jawa Barat, Pangandaran terkenal dengan pantainya yang indah dan potensi wisata baharinya. Kawasan ini juga memiliki daya tarik wisata alam lainnya seperti Cagar Alam Pangandaran dan Green Canyon (Suherman & Riyadi, 2020).
- 3) Kawasan Bandung Raya: Bandung dan sekitarnya, termasuk Lembang dan Ciwidey, merupakan kawasan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, wisata kuliner, dan sejarah. Bandung Raya telah lama menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, terutama dengan daya tarik alam seperti Tangkuban Perahu dan Kawah Putih.
- 4) Pengembangan KSPD dan Pariwisata Berkelanjutan. Pengembangan KSPD di Jawa Barat juga diarahkan untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa setiap pengembangan pariwisata di kawasan-kawasan tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Misalnya, di kawasan Puncak, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan

pembatasan pembangunan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti di sekitar hutan lindung dan daerah tangkapan air (Sutopo et al., 2020)

- 5) Infrastruktur Pendukung di KSPD. Salah satu fokus pengembangan KSPD adalah penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pariwisata. Di Jawa Barat, pengembangan jalan, akses transportasi, serta fasilitas umum seperti hotel dan restoran telah menjadi prioritas di kawasan-kawasan KSPD. Misalnya, di kawasan Pangandaran, pemerintah telah meningkatkan kualitas akses jalan dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung wisata bahari dan memudahkan akses wisatawan ke area tersebut (Yudhistira, 2021).
- 6) Dampak Ekonomi KSPD Terhadap Masyarakat Lokal. Kehadiran KSPD di Jawa Barat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Kegiatan pariwisata di kawasan-kawasan ini menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor perhotelan, kuliner, dan pemandu wisata. Selain itu, masyarakat setempat juga dapat mengembangkan usaha mikro dan menengah (UMKM) yang terkait dengan pariwisata, seperti kerajinan tangan dan produk lokal lainnya. Dampak positif ini telah dirasakan oleh masyarakat di kawasan Pangandaran dan Bandung Raya, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai hasil dari pertumbuhan sektor pariwisata (Haryanto, 2020).
- 7) Tantangan dalam Pengembangan KSPD. Meski memiliki potensi besar, pengembangan KSPD di Jawa Barat tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah lingkungan, terutama di kawasan Puncak yang mengalami degradasi lingkungan akibat urbanisasi dan perkembangan pariwisata yang tidak terkendali. Di sisi lain, tantangan sosial juga muncul, terutama dalam memastikan keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata (Suherman & Riyadi, 2020).

- 8) Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan KSPD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengelolaan KSPD. Kebijakan ini meliputi pelatihan bagi masyarakat lokal, promosi destinasi wisata secara nasional dan internasional, serta pemberian insentif bagi investasi di sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa pengembangan pariwisata di KSPD mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk dalam hal pelestarian budaya dan alam (Kementerian Pariwisata, 2021).

Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 49 juta jiwa pada tahun 2020. Secara demografis, masyarakat Jawa Barat didominasi oleh suku Sunda, yang memiliki bahasa dan budaya yang khas. Namun, perkembangan sosial di provinsi ini telah banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi dan migrasi, khususnya di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang menjadi pusat ekonomi utama (BPS Jawa Barat, 2020). Masyarakat Jawa Barat juga memiliki nilai-nilai kultural yang kuat, termasuk gotong-royong dan religiusitas, yang menjadi fondasi kehidupan sosial di daerah pedesaan maupun perkotaan (Rahardjo, 2021).

Urbanisasi di Jawa Barat meningkat pesat, terutama di daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang. Urbanisasi ini telah menyebabkan pergeseran dalam struktur sosial masyarakat, dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat perkotaan yang lebih modern dan industri. Fenomena urbanisasi ini juga mengakibatkan masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan,

pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Di daerah pedesaan, modernisasi mulai mempengaruhi cara hidup masyarakat, meskipun nilai-nilai tradisional masih dipegang erat (Suryana & Wibowo, 2019).

Tingkat pendidikan di Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah pedesaan di wilayah selatan Jawa Barat, seperti Garut dan Tasikmalaya, memiliki tingkat partisipasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bekasi (BPS Jawa Barat, 2020).

Dalam hal kesehatan, masyarakat Jawa Barat dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Meskipun fasilitas kesehatan di kota-kota besar seperti Bandung dan Bogor cukup memadai, akses terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan dan daerah terpencil masih kurang. Penyakit menular dan gizi buruk juga masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Hidayat & Nurhayati, 2020). Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun distribusi fasilitas dan tenaga medis masih menjadi kendala.

Secara ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Perekonomian Jawa Barat sangat beragam, mencakup sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa. Industri manufaktur, terutama yang terkait dengan sektor otomotif dan elektronik, merupakan salah satu penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta menjadi pusat dari aktivitas industri ini, menarik banyak investasi domestik dan asing (Kuswoyo,

2021). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor industri juga menyebabkan kerentanan terhadap perubahan ekonomi global, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19.

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama di Jawa Barat. Sektor industri yang berkembang pesat di wilayah utara Jawa Barat telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat perkotaan di sekitar kawasan industri. Namun, daerah-daerah pedesaan, terutama di wilayah selatan seperti Cianjur dan Garut, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi karena ketergantungan pada sektor pertanian yang kurang produktif dan minimnya akses terhadap infrastruktur dan teknologi modern (Hidayat, 2020). Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah pedesaan.

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian bagi sebagian besar masyarakat pedesaan di Jawa Barat, terutama di wilayah selatan dan tengah. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung, dan sayuran. Meskipun demikian, sektor pertanian di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan, termasuk alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan, perubahan iklim, serta kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi telah meluncurkan program modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan (Samadikun & Wulandari, 2020).

Pariwisata juga merupakan sektor yang berkembang pesat di Jawa Barat. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, provinsi ini menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Destinasi wisata populer seperti Puncak, Bandung, dan Pangandaran menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan internasional. Pariwisata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

pendapatan masyarakat lokal. Namun, sektor pariwisata juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan (Nugraha & Azis, 2021).

Tingkat pengangguran di Jawa Barat masih relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, meskipun sektor industri berkembang pesat. Salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, sektor informal masih menyerap sebagian besar tenaga kerja di wilayah pedesaan, yang cenderung memiliki tingkat pendapatan yang rendah (Pangestu & Wijaya, 2019).

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh provinsi ini, termasuk ketimpangan ekonomi, urbanisasi, dan masalah pengangguran. Namun, dengan potensi besar di sektor industri, pariwisata, dan pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Jawa Barat memiliki peluang untuk terus berkembang menjadi salah satu provinsi terkemuka di Indonesia. Pengembangan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, dan pengurangan ketimpangan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan di masa depan.

Kriteria dan Standar Destinasi Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Daya Saing

Kegiatan usaha pariwisata halal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumnya. Kegiatan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan usaha pariwisata halal tersebut, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Qory & Dewi, 2021).

Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor N-K.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah. Secara umum Peraturan Menteri diatas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syariah (Qory & Dewi, 2021).

Namun, pada tahun 2016, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal (Qory & Dewi, 2021).

Solusi utama dari permasalahan aspek hotel, travel, dan makanan halal dengan kriteria makanan halal adalah standarisasi makanan halal. Standarsisasi makanan halal sudah dalam proses sertifikat halal untuk makanan. Maka hasil pembahasan ini, standarisasi makanan halal berupa sertifikasi makanan, restoran, dan kafe terus ditingkatkan, karena dapat mengatasi permasalahan makanan halal di Jawa Barat (Huda dkk., 2020). Pariwisata halal adalah segmen pasar yang sedang berkembang yang melayani kebutuhan religius wisatawan

Muslim. Pembahasan menunjukkan bahwa gaya hidup Islami, makanan halal, dan keamanan merupakan motivator utama dalam memilih hotel halal (Pamukcu & Sarıışık, 2020). Standardisasi praktik pariwisata halal sangat penting untuk meningkatkan daya saing, dengan fokus pada akomodasi, makanan, dan layanan (Pamukcu & Sarıışık, 2020; Boğan & Sarıışık, 2019).

Atribut daya saing destinasi, termasuk sumber daya utama, faktor pendukung, dan manajemen destinasi, secara signifikan memengaruhi niat wisatawan untuk mengunjungi destinasi halal (Lestari et al., 2022). Kontrol perilaku yang dirasakan, nilai, dan kepercayaan merupakan faktor kunci yang memengaruhi niat berkunjung bagi wisatawan muslim (Lestari et al., 2022; Sodawan & Hsu, 2022). Menariknya, wisatawan non-muslim juga menunjukkan minat terhadap pariwisata halal, dengan persepsi mereka terhadap produk dan layanan halal yang berdampak pada pengalaman, nilai, dan kepuasan perjalanan (Rahman et al., 2020). Untuk meningkatkan daya saing, destinasi harus fokus pada praktik pariwisata berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, promosi, dan aspek lingkungan (Lestari et al., 2022).

Bagi wisatawan Muslim Indonesia yang berkunjung ke negara non-Muslim, atribut pariwisata halal tertentu secara positif memengaruhi citra destinasi, niat berkunjung kembali, dan niat merekomendasikan (Wibawa et al., 2021). Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan pariwisata untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melayani wisatawan Muslim dan non-Muslim di destinasi pariwisata halal.

Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat

Prioritas strategi dalam mengembangkan pariwisata halal di Jawa Barat adalah dari aspek sinergi. Pratiwi et al (2021) menyatakan bahwa pariwisata halal di Jawa Barat dapat dikembangkan melalui dukungan dari berbagai lintas Lembaga. Lintas Lembaga ini merupakan sinergi antara Lembaga yang terkait dengan pariwisata halal di Jawa Barat. Stekholder atau Lembaga yang terkait dengan pariwisata halal, yaitu dinas pariwisata Jawa Barat, pengusaha hotel, kuliner, pengelola objek wisata, dan akademisi. Sehingga pariwisata halal di Jawa Barat dapat berkembang menjadi salah satu pusat wisata halal di Indonesia (Huda dkk., 2020).

Pariwisata halal semakin dikenal sebagai pendorong potensial pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi niat wisatawan Muslim untuk mengunjungi destinasi halal antara lain pemasaran halal, atribut destinasi, dan nilai yang dipersepsikan (Abrista Devi & I. Firmansyah, 2019; Ali Mursid & Pandji Anoraga, 2021). Atribut daya saing destinasi, seperti sumber daya utama, faktor pendukung, dan manajemen destinasi, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan niat berkunjung wisatawan (Y. Lestari et al., 2022).

Pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan, tetapi menunjukkan potensi untuk berkembang. Isu-isu utama meliputi aturan pelaksanaan, pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda et al., 2020). Pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim membutuhkan fasilitas tambahan seperti ruang ibadah dan pilihan makanan halal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (CHSE) (S. Santoso et al., 2021).

Untuk meningkatkan pariwisata halal, para pemangku kepentingan harus fokus pada peningkatan infrastruktur,

promosi, layanan, dan aspek lingkungan. Pendekatan ini dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memposisikan negara seperti Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka (Y. Lestari et al., 2022; S. Santoso et al., 2021).

Kota Bandung dan Kab. Bandung sebagai kota utama di Jawa Barat, diuntungkan oleh dukungan pemerintah yang kuat, berbagai destinasi wisata, dan fasilitas keagamaan, tetapi menghadapi persaingan dari daerah lain yang mengembangkan pariwisata halal (Qory et al., 2021). Agar berhasil, Jawa Barat harus memanfaatkan kekuatannya, mengatasi kelemahan, dan mengimplementasikan rencana strategis untuk menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka.

Implementasi Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Menuju Pariwisata Keberlanjutan

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, mengingat populasi mayoritas Muslim serta berbagai atraksi wisata alam dan budaya yang kaya. Pengembangan atraksi pariwisata halal tidak hanya berfokus pada layanan dan produk yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga pada kelestarian budaya lokal serta daya tarik alam yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Atraksi atau daya tarik wisata ini perlu dirancang dan dikelola dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim, sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal secara bertanggung jawab.

Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan yang memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap elemen layanan dan produknya, termasuk atraksi, akomodasi, makanan, transportasi, dan aktivitas wisata. Elemen atraksi dalam pariwisata halal berfokus pada penyediaan hiburan dan kegiatan wisata yang tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti tidak adanya kegiatan yang berbau alkohol, perjudian, atau aktivitas yang tidak sesuai norma agama (Battour & Ismail, 2016). Salah satu elemen penting dalam pariwisata halal adalah fasilitas ramah Muslim di hotel, termasuk penyediaan arah kiblat, tempat wudhu yang memadai, sajadah dalam laci, serta pemisahan makanan halal dan non-halal. Hotel Trans Luxury di Bandung menjadi contoh hotel yang mengimplementasikan konsep ini dengan menyediakan restoran halal di lantai khusus yang menggunakan peralatan dan koki terpisah. Meskipun demikian, hotel masih dapat menyajikan minuman seperti wine, tetapi di area dan dengan penanganan terpisah agar tidak mencemari makanan halal (Dina S, Wawancara, 12 Oktober 2024).

Pengembangan destinasi pariwisata ramah Muslim di Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan layanan yang inklusif di semua destinasi, tanpa membatasi pasar. Atraksi wisata alam yang memenuhi kriteria unggulan tetap melayani semua pengunjung, memastikan destinasi menarik bagi segmen wisatawan yang lebih luas. Sosialisasi kepada industri pariwisata, hotel, dan restoran menegaskan bahwa layanan ramah Muslim memperluas daya tarik wisata, meningkatkan daya saing, dan menarik lebih banyak pengunjung.

Dalam mengembangkan atraksi pariwisata halal, Jawa Barat harus mempertimbangkan sejumlah faktor:

- a. Potensi Alam dan Budaya: Provinsi ini kaya dengan potensi wisata alam seperti pegunungan, pantai, danau, dan air terjun, serta situs-situs budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Sebagai contoh, wisata religi di situs-situs sejarah penyebaran Islam di Cirebon atau wisata alam di Kawah Putih dan Pantai Pangandaran dapat dikembangkan sebagai destinasi halal dengan mengintegrasikan fasilitas yang ramah Muslim, seperti area sholat yang memadai, restoran halal, dan penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- b. Desain Atraksi Wisata Halal: Menurut pembahasan dari Duman (2020), desain atraksi wisata halal harus mempertimbangkan tiga aspek utama: (1) Keselarasan dengan prinsip Islam, (2) Komponen ramah lingkungan, dan (3) Penyediaan pengalaman autentik bagi wisatawan. Misalnya, atraksi berbasis alam seperti eco-tourism yang diintegrasikan dengan penyediaan fasilitas ramah Muslim. Wisatawan dapat menikmati alam Jawa Barat dengan paket wisata yang menawarkan aktivitas yang tidak melanggar syariat, seperti hiking di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau wisata agro di daerah Lembang, tanpa adanya gangguan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

- c. Pendidikan dan Kesadaran Lokal: Mengembangkan atraksi halal tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan Muslim, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam memahami konsep pariwisata halal. Edukasi kepada pelaku wisata lokal sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan wisatawan Muslim. Hal ini selaras dengan pembahasan yang dilakukan oleh Henderson (2019) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam membangun destinasi halal melalui pemberdayaan, edukasi, dan pelatihan.

Tantangan Pengembangan Pariwisata Halal

Secara keseluruhan, tantangan utama meliputi integrasi konsep halal dalam tur, peningkatan kompetensi SDM, pendanaan terbatas, serta sosialisasi yang kurang. Dukungan pemerintah dan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan di Jawa Barat. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi adalah keberlanjutan implementasi konsep pariwisata halal setelah diskusi dan seminar. Meskipun telah ada pernyataan positif dan upaya yang dilakukan, realisasi di lapangan sering kali tertunda. Salah satu strategi yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas implementasi adalah melibatkan food blogger dan influencer yang mampu menilai fasilitas, seperti hotel dan pusat perbelanjaan, yang telah memenuhi standar ramah muslim. Pendekatan ini diharapkan dapat memotivasi sektor lain untuk berbenah dan meningkatkan standar pelayanan. Terkait dengan penghargaan dan sertifikasi, tahun ini menjadi awal bagi pengakuan destinasi pariwisata halal di wilayah tersebut, dengan Bogor sebagai salah satu pemenang karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. Meskipun demikian, sebagian pihak menekankan bahwa pentingnya penghargaan ini terletak pada penerapan nyata di lapangan, bukan hanya pengakuan di atas kertas. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan tanpa implementasi konkret tidak memiliki dampak signifikan.

- a. **Infrastruktur dan Fasilitas Halal:** Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Jawa Barat dalam mengembangkan pariwisata halal adalah ketersediaan fasilitas halal, seperti restoran bersertifikasi halal dan penginapan dengan layanan syariah. Menurut studi yang dilakukan oleh Fatimah et al. (2021), meskipun atraksi halal mulai berkembang, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur yang memadai dengan permintaan wisatawan.
- b. **Konsistensi dan Pengawasan:** Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan sistem sertifikasi dan pengawasan yang ketat guna memastikan bahwa atraksi yang diiklankan sebagai halal benar-benar sesuai dengan standar halal nasional dan internasional. Sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi di Jawa Barat, sebagaimana dibahas oleh Nugroho (2020), yang menekankan pentingnya transparansi dalam industri pariwisata halal.

Kawasan Puncak di Jawa Barat merupakan salah satu contoh implementasi awal pariwisata halal, di mana banyak restoran dan hotel yang sudah bersertifikat halal dan menyediakan fasilitas ramah Muslim. Berdasarkan studi oleh Aziz & Fauzi (2019), Puncak dipilih oleh wisatawan Muslim dari dalam dan luar negeri karena lokasinya yang strategis, iklim yang sejuk, serta penyediaan fasilitas halal yang memadai. Implementasi konsep halal di Puncak telah meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai destinasi wisata halal, meskipun tantangan terkait konsistensi layanan dan fasilitas halal masih menjadi isu utama yang harus diperhatikan.

Pengembangan atraksi wisata halal di Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari penyediaan infrastruktur yang ramah Muslim hingga pendidikan bagi pelaku industri lokal. Tantangan terkait fasilitas halal dan pengawasan perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa destinasi yang dikembangkan sesuai dengan

standar internasional dan dapat bersaing di pasar global. Pengembangan atraksi atau daya tarik wisata halal di Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari strategi besar dalam mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis syariah. Jawa Barat, dengan kekayaan alam, budaya, dan keragaman masyarakatnya, memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal terkemuka, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Namun, pengembangan tersebut membutuhkan pendekatan yang holistik, mulai dari penyesuaian terhadap norma-norma syariah hingga peningkatan fasilitas penunjang yang ramah bagi wisatawan Muslim. Dalam konteks pariwisata halal, atraksi yang dikembangkan tidak hanya harus menarik secara estetika dan budaya, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip halal dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, yang mencakup ketersediaan fasilitas ibadah, makanan halal, hingga konsep pengelolaan yang tidak melanggar syariat.

Prinsip Pengembangan Atraksi Halal

Prinsip pengembangan atraksi halal di Jawa Barat menghadapi tantangan terkait penyesuaian budaya lokal dengan konsep pariwisata halal, meski sebenarnya tidak ada pertentangan mendasar antara keduanya. Isu utama yang muncul adalah persepsi negatif dari budayawan yang menganggap pariwisata halal dapat membatasi ekspresi budaya, seperti tari tradisional. Sementara itu, beberapa fasilitas penting untuk menunjang pariwisata halal, seperti tempat ibadah dan toilet yang bersih, perlu perhatian khusus. Kabupaten Bandung menonjol sebagai pelopor dengan Peraturan Daerah tentang pariwisata halal, meski implementasinya memerlukan dukungan dan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi serta dukungan politis yang konsisten.

Pengembangan atraksi halal di Jawa Barat berfokus pada tiga komponen utama: alam, budaya, dan nilai religius. Atraksi-atraksi yang ada, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, dan Kawah Putih, misalnya, telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pengembangan konsep halal terhadap atraksi ini mencakup penyediaan fasilitas yang menunjang ibadah, seperti mushola yang memadai, tempat wudhu yang bersih, serta ketersediaan informasi mengenai tempat-tempat makanan halal di sekitar lokasi wisata.

Di bidang budaya, beberapa festival lokal diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, pertunjukan seni budaya seperti tari-tarian tradisional Jawa Barat yang seringkali menjadi atraksi bagi wisatawan internasional kini disesuaikan untuk menghindari aspek-aspek yang tidak sesuai dengan prinsip halal, seperti penggunaan pakaian yang lebih sopan dan waktu pertunjukan yang tidak mengganggu waktu shalat.

Sementara itu, pada aspek nilai religius, destinasi wisata religi seperti Masjid Raya Bandung dan kawasan Puncak, yang dikenal dengan suasana Islami-nya, juga terus ditingkatkan. Atraksi-atraksi wisata religi ini menjadi semakin populer di kalangan wisatawan Muslim yang tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga pengalaman spiritual yang selaras dengan keyakinan

mereka. Penguatan ini didasarkan pada upaya meningkatkan kesadaran akan potensi wisata halal, sebagaimana disebutkan oleh Riza (2022), yang menekankan pentingnya pengembangan wisata berbasis nilai agama untuk menjawab kebutuhan wisatawan Muslim global.

Infrastruktur pendukung pariwisata halal di Jawa Barat melibatkan kolaborasi dengan berbagai asosiasi dan lembaga, termasuk GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), yang memiliki peran mirip dengan Kadin di sektor industri umum. Sejak tahun 2004, fokus pengembangan pariwisata halal dimulai dari makanan bersertifikasi halal, dan pada tahun 2027 diharapkan seluruh destinasi, produk, dan jasa wisata sudah memiliki sertifikasi halal.

Dua lembaga kunci dalam standarisasi adalah Badan Nasional Sertifikasi (BSN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BSN bertanggung jawab atas standarisasi produk, sementara BNSP mengatur standar kualifikasi SDM. Sertifikasi usaha pariwisata dikeluarkan oleh lembaga swasta berlisensi dari BSN, sementara sertifikasi profesi dikelola oleh lembaga berlisensi dari BNSP. Untuk mendukung daya tarik wisata halal, pengembangan infrastruktur yang ramah terhadap wisatawan Muslim menjadi elemen kunci. Studi yang dilakukan oleh Hanifah & Abdullah (2020) dalam jurnal *Indonesian Journal of Tourism and Hospitality* menyoroti pentingnya infrastruktur halal-friendly, seperti restoran bersertifikat halal, hotel yang menawarkan layanan halal, serta tempat rekreasi yang mengutamakan privasi. Di Jawa Barat, berbagai hotel syariah sudah mulai bermunculan, yang menawarkan layanan sesuai dengan prinsip halal, mulai dari makanan hingga kebijakan privasi yang lebih tinggi, seperti pemisahan area untuk pria dan wanita di kolam renang dan spa.

Regulasi dan Sertifikasi Halal

Sejak tahun 2004, fokus pengembangan pariwisata halal dimulai dari makanan bersertifikasi halal, dan pada tahun 2027 diharapkan seluruh destinasi, produk, dan jasa wisata sudah

memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks internasional, BPJPH telah menjalin kerjasama mutual recognition dengan 28 negara, mencakup Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Hal ini mendukung visi Indonesia sebagai hub internasional pariwisata halal. Salah satu langkah strategis untuk menjamin pengembangan atraksi halal adalah sertifikasi halal bagi layanan yang disediakan di destinasi wisata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam memastikan bahwa berbagai sektor wisata telah memperoleh sertifikasi halal, termasuk restoran, hotel, dan produk-produk kerajinan lokal yang dijual di lokasi wisata. Hal ini sejalan dengan pembahasan Henderson (2016) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan wisatawan Muslim saat memilih destinasi wisata. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi wisatawan Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wisatawan internasional terhadap komitmen destinasi dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan standar halal.

Meskipun prospek pariwisata halal di Jawa Barat sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam dari para pelaku usaha wisata terhadap standar halal yang komprehensif. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ansi & Han (2019) dalam jurnal *Journal of Islamic Marketing*, banyak destinasi wisata yang masih perlu beradaptasi dengan lebih baik terhadap ekspektasi wisatawan Muslim global, terutama dalam aspek pelayanan yang sesuai dengan syariah. Namun, hal ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata halal di Jawa Barat. Oktaviani & Ramdhan (2021) juga menyoroti tantangan lain berupa ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dengan kapasitas layanan halal yang tersedia. Hal ini menekankan perlunya pengembangan yang lebih terstruktur dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat daya saing destinasi wisata halal.

Pengembangan atraksi atau daya tarik wisata halal di Jawa Barat telah menjadi prioritas strategis dalam memperkuat posisi provinsi ini sebagai salah satu destinasi utama wisata halal dunia. Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah dalam penyediaan fasilitas dan layanan wisata, disertai dengan komitmen pemerintah dalam hal regulasi dan sertifikasi halal, potensi wisata halal di Jawa Barat terus berkembang. Namun, untuk menghadapi tantangan yang ada, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan wisata yang benar-benar ramah bagi wisatawan Muslim.

Pengembangan daya tarik wisata melibatkan banyak faktor dan pemangku kepentingan. Ulasan pengunjung dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengelola objek wisata alam, menyoroti tema-tema seperti lingkungan, infrastruktur, dan aktivitas (Ali Öztüren et al., 2021). Teori jaringan aktor dan kemampuan sosial menawarkan pendekatan alternatif untuk memahami bagaimana atraksi postmodern diciptakan melalui jaringan relasional aktor manusia dan non-manusia (Yeong-Shyang Chen & Wu, 2021).

Konsep “kegunaan atraksi pengunjung” menekankan bagaimana teknik pengelolaan di lokasi berdampak pada pengalaman pengunjung, menyarankan agar pengelola berfokus pada kemudahan penggunaan dan desain aktivitas (Navarro-Ruiz & Mckercher, 2020). Untuk pengembangan ekowisata, strategi harus didasarkan pada analisis kelayakan objek wisata dan persepsi pengunjung dan masyarakat lokal. Pendekatan ini dapat membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Kebun Raya Liwa di Indonesia (Harianto et al., 2020). Pengembangan daya tarik wisata merupakan proses yang melibatkan berbagai faktor dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Ulasan atau feedback dari pengunjung dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dalam mengelola objek wisata alam, dengan menyoroti aspek-aspek penting seperti kelestarian

lingkungan, kualitas infrastruktur, serta keberagaman aktivitas yang tersedia. Dengan memahami masukan dari pengunjung, pengelola dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memperbaiki dan mengembangkan daya tarik wisata, sehingga dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat (Ali Öztüren et al., 2021).

Teori jaringan aktor dan kemampuan sosial memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana atraksi postmodern terbentuk melalui hubungan relasional antara aktor manusia dan non-manusia. Dalam pandangan ini, atraksi tidak hanya dilihat sebagai hasil dari interaksi antar individu, tetapi juga melibatkan objek dan entitas non-manusia yang berperan penting dalam membentuk dinamika sosial dan budaya. Jaringan ini membentuk suatu sistem yang saling berhubungan, di mana kekuatan dan pengaruh suatu aktor dapat bergantung pada koneksinya dengan aktor lainnya, baik manusia maupun non-manusia, untuk menciptakan makna dan atraksi dalam konteks postmodern (Yeong-Shyang Chen & Wu, 2021).

Konsep kegunaan atraksi pengunjung menyoroti pentingnya pengelolaan yang baik di lokasi atraksi dalam mempengaruhi pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung. Penekanan utama dari konsep ini adalah bagaimana teknik pengelolaan yang diterapkan, seperti desain aktivitas dan kemudahan penggunaan fasilitas, dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Oleh karena itu, pengelola atraksi disarankan untuk fokus pada perancangan pengalaman yang memudahkan pengunjung, baik dari segi aksesibilitas, interaksi dengan aktivitas yang ada, maupun kemudahan navigasi di lokasi, guna menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan bernilai (Navarro-Ruiz & Mckercher, 2020). Dalam pengembangan ekowisata, penting untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada analisis kelayakan objek wisata serta persepsi pengunjung dan masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ekowisata tidak hanya menguntungkan

dari segi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan, serta mempertimbangkan bagaimana mereka memandang objek wisata tersebut, ekowisata dapat berkembang dengan mempertahankan keberlanjutan alam dan pemberdayaan komunitas. Hal ini terbukti efektif dalam kasus Kebun Raya Liwa di Indonesia, di mana analisis kelayakan dan keterlibatan masyarakat lokal telah berperan penting dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pihak (Harianto et al., 2020).

Peningkatan Aksesibilitas (Accessibility)

Peningkatan Aksesibilitas (Accessibility) dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat menuju Pariwisata Berkelanjutan. Aksesibilitas adalah salah satu pilar utama dalam pengembangan destinasi pariwisata, termasuk pariwisata halal, yang memiliki peran krusial dalam menjamin pengalaman wisata yang nyaman, mudah, dan inklusif bagi wisatawan. Di Provinsi Jawa Barat, upaya peningkatan aksesibilitas dalam konteks pariwisata halal tidak hanya ditujukan untuk memudahkan mobilitas wisatawan, tetapi juga mencakup adaptasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim. Langkah ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang, sejalan dengan standar global pariwisata berkelanjutan.

Konsep Aksesibilitas dalam Pariwisata Halal

Beberapa destinasi unggulan seperti Ciater, Balongan, dan Kawah Putih disebut memiliki potensi besar, namun terdapat kesenjangan antara destinasi yang sudah berkembang dan yang belum optimal dalam aspek aksesibilitas. Aksesibilitas yang dimaksud bukan hanya tentang transportasi menuju lokasi, tetapi juga kemudahan aktivitas wisatawan di dalam area destinasi tersebut. Beberapa lokasi seperti Ciater memiliki

potensi untuk dikenal secara nasional, namun perlu ada upaya peningkatan akses yang lebih terintegrasi dan ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.

Aksesibilitas dalam pariwisata halal tidak hanya berfokus pada aspek fisik, seperti infrastruktur jalan, transportasi, dan akses ke lokasi wisata, tetapi juga pada aksesibilitas spiritual dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Menurut Timothy dan Boyd (2015), aksesibilitas adalah elemen penting yang memastikan keberlanjutan pariwisata, terutama dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari segmen wisatawan yang memiliki ekspektasi terhadap layanan yang halal. Dalam konteks pariwisata halal di Jawa Barat, peningkatan aksesibilitas juga berarti menyediakan fasilitas ibadah, informasi yang jelas mengenai lokasi makanan halal, serta memastikan kemudahan akses ke layanan-layanan yang mematuhi prinsip syariah.

Studi oleh Rahman et al. (2021) dalam jurnal *Journal of Islamic Marketing* menekankan bahwa aksesibilitas dalam pariwisata halal juga harus memperhatikan inklusivitas bagi semua kalangan wisatawan, termasuk penyandang disabilitas dan wisatawan senior. Hal ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang mendorong pariwisata yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi.

Infrastruktur Aksesibilitas di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan aksesibilitas fisik menuju dan di dalam destinasi wisata halal melalui berbagai proyek infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan kawasan wisata seperti Puncak, Lembang, dan Pangandaran bertujuan untuk memperbaiki akses bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu, pengembangan sarana transportasi umum seperti kereta api dan bus wisata halal, yang dilengkapi dengan fasilitas ibadah dan informasi halal, turut menjadi salah satu fokus. Sebagaimana diungkapkan oleh Hermanto dan Dewi (2020) dalam jurnal *Indonesian Tourism Journal*, keberadaan transportasi publik yang mudah diakses, murah, dan nyaman

akan meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi-destinasi halal di Jawa Barat.

Ketersediaan informasi digital juga memainkan peran penting dalam aksesibilitas, dengan pengembangan aplikasi berbasis lokasi yang memberikan informasi tentang tempat-tempat ibadah, restoran halal, dan titik-titik penting lainnya di kawasan wisata. Platform ini tidak hanya mempermudah wisatawan dalam perencanaan perjalanan, tetapi juga memastikan pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip halal.

Aksesibilitas Spiritual dan Budaya

Selain aksesibilitas fisik, destinasi wisata halal di Jawa Barat juga memperhatikan aksesibilitas spiritual. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan ruang ibadah yang memadai di lokasi-lokasi wisata, seperti masjid, mushola, dan tempat wudhu yang bersih dan mudah dijangkau. Di destinasi populer seperti kawasan wisata Puncak, Lembang, dan Bandung, pengelola wisata menyediakan fasilitas ibadah di berbagai titik untuk memudahkan wisatawan Muslim menjalankan kewajiban agama mereka. Menurut Oktaviani & Rahmawati (2021), keberadaan fasilitas ibadah di destinasi wisata halal menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik wisatawan Muslim, baik domestik maupun mancanegara. Selain fasilitas ibadah, aksesibilitas budaya juga menjadi fokus pengembangan, di mana atraksi budaya dan aktivitas wisata disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, dalam pengembangan wisata budaya di Cirebon dan Tasikmalaya, pemerintah setempat berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk menyajikan atraksi seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma syariah.

Keberlanjutan dalam Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas merupakan bagian integral dari upaya menuju pariwisata berkelanjutan. Menurut UNWTO (2017), pariwisata yang berkelanjutan harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti

wisatawan penyandang disabilitas dan lansia. Dalam konteks ini, pengembangan aksesibilitas yang ramah bagi semua kalangan, tidak hanya wisatawan Muslim, menjadi prioritas. Di Jawa Barat, penerapan desain universal dalam pengembangan infrastruktur pariwisata halal bertujuan untuk memastikan bahwa semua wisatawan, tanpa memandang kondisi fisik atau sosial, dapat menikmati pengalaman wisata yang aman dan nyaman. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam memfasilitasi aksesibilitas, seperti aplikasi yang membantu wisatawan Muslim menemukan restoran halal atau tempat ibadah, berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Jawa Barat untuk menciptakan destinasi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan aksesibilitas pariwisata halal di Jawa Barat. Salah satunya adalah distribusi infrastruktur yang belum merata. Daerah-daerah yang terletak jauh dari pusat kota besar seperti Bandung dan Bogor masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, terutama transportasi umum dan fasilitas penunjang halal. Pembahasan Ahmad et al. (2020) dalam jurnal *Sustainability* menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik yang tidak merata dapat menjadi penghambat dalam pengembangan destinasi halal, terutama di kawasan yang lebih terpencil. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk pengembangan pariwisata terpadu, di mana pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dapat berkolaborasi untuk membangun jalur transportasi yang lebih efisien, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim di setiap titik destinasi. Selain itu, promosi digital yang lebih gencar, baik melalui aplikasi maupun media sosial, dapat membantu mengurangi tantangan aksesibilitas informasi bagi wisatawan internasional yang ingin mengunjungi destinasi halal di Jawa Barat.

Peningkatan aksesibilitas sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat memainkan peran penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek aksesibilitas fisik, spiritual, dan budaya, Jawa Barat dapat menciptakan lingkungan wisata yang inklusif, ramah terhadap wisatawan Muslim, dan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang terbuka lebar dalam pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. Pariwisata halal semakin dikenal sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Faktor-faktor utama yang memengaruhi niat beli halal meliputi pemasaran halal, penawaran wisata halal, dan kesadaran halal (Abrista Devi & I. Firmansyah, 2019). Menerapkan prinsip-prinsip desain universal sangat penting untuk menciptakan destinasi pariwisata yang dapat diakses dan mengakomodasi semua pengunjung, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik (S. R. Sari et al., 2022).

Atribut destinasi halal secara signifikan memengaruhi daya tarik destinasi, nilai fungsional dan emosional yang dirasakan, dengan nilai emosional memainkan peran penting dalam niat berkunjung kembali (Ali Mursid & Pandji Anoraga, 2022). Model pariwisata halal yang komprehensif harus mencakup enam prinsip: kemudahan, keandalan, keamanan, kepercayaan, keterbukaan, dan peningkatan berkelanjutan. Model ini harus diimplementasikan di berbagai aspek pariwisata, termasuk kebijakan, fasilitas, akomodasi, transportasi, dan sumber daya manusia, dengan tetap mematuhi hukum Syariah dan mempromosikan kemakmuran masyarakat setempat (A. Manan et al., 2023). Pariwisata halal semakin berkembang sebagai sektor penting yang tidak hanya mendukung perekonomian, tetapi juga memenuhi kebutuhan khusus wisatawan Muslim. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan Muslim untuk memilih destinasi pariwisata

halal adalah pemasaran yang tepat, penawaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, serta tingginya kesadaran tentang pilihan-pilihan wisata halal. Pemasaran yang efektif dapat memperkenalkan destinasi dan layanan yang memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis wisatawan Muslim, sedangkan penawaran wisata halal yang sesuai dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya prinsip halal dalam pariwisata semakin mendorong permintaan terhadap destinasi yang ramah Muslim (Abrista Devi & I. Firmansyah, 2019).

Prinsip desain universal berperan penting dalam menciptakan destinasi pariwisata yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Desain universal menekankan pada penyediaan fasilitas yang memungkinkan semua pengunjung, tanpa terkecuali, untuk menikmati pengalaman wisata dengan mudah dan nyaman. Hal ini mencakup aksesibilitas yang lebih baik untuk penyandang disabilitas, pengaturan ruang yang ramah pengguna, serta layanan yang memenuhi kebutuhan semua jenis pengunjung. Dengan menerapkan prinsip desain universal, destinasi pariwisata dapat memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kemampuan fisiknya, dapat menikmati pengalaman yang setara. (S. R. Sari et al., 2022).

Atribut destinasi halal memiliki pengaruh besar terhadap daya tarik sebuah tempat wisata, dengan memberikan nilai fungsional yang berkaitan dengan kebutuhan dasar wisatawan Muslim, seperti ketersediaan fasilitas ibadah dan makanan halal. Selain itu, nilai emosional juga memainkan peran yang sangat penting, karena pengalaman spiritual dan kenyamanan yang dirasakan dapat memperkuat hubungan emosional wisatawan dengan destinasi tersebut. Wisatawan yang merasa terhubung secara emosional dengan destinasi halal cenderung memiliki niat untuk berkunjung kembali, yang berkontribusi pada loyalitas pengunjung dan pertumbuhan pariwisata halal secara berkelanjutan. (Ali Mursid & Pandji Anoraga, 2022). Model pariwisata halal yang efektif harus didasarkan pada enam

prinsip dasar: kemudahan, keandalan, keamanan, kepercayaan, keterbukaan, dan peningkatan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan dalam setiap aspek pariwisata, termasuk kebijakan pemerintah, fasilitas yang disediakan, akomodasi, transportasi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang terlatih. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memastikan bahwa pariwisata halal tetap sesuai dengan hukum Syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Implementasi model ini akan menciptakan pengalaman yang aman, nyaman, dan menguntungkan bagi wisatawan, serta memperkuat industri pariwisata halal secara keseluruhan. (A. Manan et al., 2023).

Penyediaan Fasilitas (Amenity)

Fasilitas atau amenitas merupakan elemen penting dalam pengembangan destinasi pariwisata, terutama dalam konteks pariwisata halal. Penyediaan fasilitas yang memadai tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman wisata yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi inti dari pariwisata halal. Di Provinsi Jawa Barat, pengembangan fasilitas yang mendukung wisata halal menjadi prioritas strategis, khususnya dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Prinsip Penyediaan Fasilitas dalam Pariwisata Halal

Dalam konteks pariwisata halal, penyediaan fasilitas harus mempertimbangkan kebutuhan khusus wisatawan Muslim. Menurut Battour dan Ismail (2016), fasilitas-fasilitas seperti restoran halal, tempat ibadah, dan hotel yang ramah Muslim merupakan faktor kunci dalam menarik wisatawan Muslim. Di Jawa Barat, pemerintah dan pelaku usaha pariwisata telah mulai berfokus pada penyediaan fasilitas yang tidak hanya halal secara sertifikasi, tetapi juga mendukung kebutuhan spiritual

wisatawan Muslim, seperti mushola, tempat wudhu, serta fasilitas ramah keluarga, yang memungkinkan wisatawan menjalankan ibadah dengan nyaman selama perjalanan.

Pembahasan oleh Mohsin, Ramli, dan Alkhulayfi (2017) dalam *Tourism Management Perspectives* menekankan pentingnya penyediaan fasilitas halal yang terstandarisasi di berbagai destinasi wisata. Hal ini termasuk restoran dan kafe yang menyajikan makanan bersertifikat halal, serta hotel yang menyediakan layanan seperti arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an, dan informasi waktu shalat. Di destinasi wisata seperti Bandung dan Garut, beberapa hotel dan restoran sudah mulai menawarkan layanan ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik destinasi bagi wisatawan Muslim lokal dan internasional.

Salah satu fasilitas terpenting yang dibutuhkan dalam destinasi wisata halal adalah fasilitas ibadah. Fasilitas seperti mushola, masjid, dan tempat wudhu harus tersedia di tempat-tempat wisata utama di Jawa Barat, dan harus mudah diakses oleh wisatawan. Berdasarkan pembahasan Henderson (2016), destinasi wisata halal yang sukses biasanya memiliki fasilitas ibadah yang strategis dan memenuhi standar kenyamanan. Di Jawa Barat, destinasi wisata populer seperti Kawah Putih, Pantai Pangandaran, dan Taman Safari Bogor telah dilengkapi dengan mushola atau masjid yang mudah diakses oleh wisatawan Muslim. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan komitmen destinasi untuk menghormati kebutuhan spiritual wisatawan.

Studi Saputra dan Iskandar (2020) dalam jurnal *Indonesian Journal of Halal Tourism* menegaskan bahwa mushola yang memadai dan terawat di tempat wisata akan meningkatkan kepuasan wisatawan Muslim, yang secara langsung berdampak pada reputasi destinasi sebagai lokasi yang ramah Muslim. Selain itu, adanya informasi yang jelas dan tersedianya fasilitas yang bersih dan terjaga turut menjadi faktor penting dalam pengembangan destinasi wisata halal yang berkelanjutan.

Dalam hal penginapan, hotel-hotel di Jawa Barat yang ingin menarik wisatawan Muslim harus menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk penyediaan makanan halal, kebijakan privasi yang lebih ketat, serta fasilitas yang memungkinkan wisatawan Muslim menjalankan ibadah dengan mudah, seperti petunjuk arah kiblat, perlengkapan ibadah di kamar, dan informasi waktu shalat. Pembahasan Rahman et al. (2021) dalam jurnal *Journal of Islamic Marketing* menunjukkan bahwa wisatawan Muslim sangat memperhatikan kualitas layanan halal dalam memilih penginapan, dan hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam membangun loyalitas terhadap destinasi.

Beberapa hotel syariah di Jawa Barat, terutama di kawasan wisata utama seperti Lembang dan Bogor, telah beradaptasi dengan konsep halal hospitality, di mana kebijakan seperti pemisahan area kolam renang untuk pria dan wanita, serta larangan alkohol di lingkungan hotel, diterapkan. Ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang mencakup tidak hanya aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang menghormati nilai-nilai lokal dan keyakinan agama wisatawan.

Penyediaan makanan dan minuman halal adalah salah satu elemen krusial dalam pengembangan destinasi wisata halal. Menurut Al-Ansi dan Han (2019), sertifikasi halal pada restoran dan tempat makan menjadi perhatian utama bagi wisatawan Muslim, terutama mereka yang berasal dari luar negeri. Di Jawa Barat, destinasi wisata utama seperti Bandung dan Puncak telah memiliki sejumlah besar restoran bersertifikat halal yang menawarkan berbagai macam kuliner lokal dan internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, upaya untuk memastikan semua restoran di destinasi wisata memiliki sertifikasi halal masih terus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendorong lebih banyak restoran, kafe, dan penyedia makanan di tempat wisata untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Menurut Oktaviani (2020) dalam *Journal of Indonesian Tourism Studies*, kemudahan akses terhadap makanan halal di destinasi wisata meningkatkan kepuasan wisatawan Muslim dan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata halal di daerah tersebut.

Keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga pelestarian lingkungan. Di destinasi wisata halal, fasilitas ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, serta pengurangan penggunaan plastik menjadi bagian penting dari desain fasilitas yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Menurut Buckley (2019) dalam jurnal *Sustainability and Tourism*, destinasi wisata halal yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan akan lebih mampu menarik wisatawan yang tidak hanya peduli dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dengan dampak lingkungan dari perjalanan mereka. Di Jawa Barat, beberapa destinasi wisata alam seperti Gunung Gede Pangrango dan Taman Hutan Raya telah mulai menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan fasilitas ramah lingkungan, seperti toilet kompos dan pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan program daur ulang. Langkah-langkah ini membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas wisata dan mendukung pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata halal yang juga menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

Penyediaan fasilitas halal yang memadai masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemerataan fasilitas di seluruh destinasi wisata di Jawa Barat. Daerah yang lebih jauh dari pusat wisata seperti Bandung atau Bogor cenderung memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas halal yang terstandarisasi. Pembahasan oleh Yusoff et al. (2021) dalam jurnal *Journal of Halal Studies* menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan fasilitas halal di destinasi wisata terpencil adalah kurangnya sumber daya dan regulasi yang mendukung.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi inovasi, terutama dalam pengembangan teknologi digital yang memungkinkan wisatawan untuk dengan mudah menemukan fasilitas halal di berbagai destinasi melalui aplikasi atau platform online. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam memastikan penyediaan fasilitas yang memadai, sesuai dengan prinsip syariah, dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat.

Penyediaan fasilitas dalam pengembangan destinasi wisata halal di Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Dengan memperhatikan aspek kenyamanan, kehalalan, dan kelestarian lingkungan, fasilitas-fasilitas yang disediakan di destinasi wisata dapat meningkatkan daya tarik dan kepuasan wisatawan Muslim. Meskipun tantangan dalam pemerataan fasilitas masih ada, potensi Jawa Barat sebagai destinasi wisata halal yang berkelanjutan tetap sangat besar, terutama dengan dukungan regulasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Penyediaan Fasilitas (Amenity) Pengembangan destinasi pariwisata halal membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup faktor lingkungan dan non-lingkungan. Prinsip-prinsip utama untuk implementasi meliputi kemudahan, keandalan, keamanan, kepercayaan, keterbukaan, dan peningkatan berkelanjutan (A. Manan et al., 2023).

Strategi yang berhasil melibatkan penyediaan fasilitas ramah Muslim seperti ruang ibadah dan makanan halal, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (CHSE) (S. Santoso et al., 2021). Pemasaran halal muncul sebagai penentu dominan dari niat beli, diikuti oleh penawaran perjalanan dan pariwisata halal, dan kesadaran halal (Abrista Devi & I. Firmansyah, 2019).

Kepuasan wisatawan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti nilai lingkungan yang dirasakan, dan faktor non-lingkungan, termasuk kinerja destinasi yang ramah halal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan citra destinasi halal (N. Zulvianti et al., 2022).

Mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam rencana pengembangan pariwisata dapat meningkatkan daya tarik destinasi halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keselarasan dengan nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip Syariah.

Pengembangan destinasi pariwisata halal memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan berbagai faktor baik yang berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosial. Faktor lingkungan meliputi keindahan alam, fasilitas ramah lingkungan, dan aksesibilitas, sementara faktor non-lingkungan mencakup pelayanan yang sesuai dengan prinsip halal serta keterlibatan masyarakat lokal. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, enam prinsip utama harus diperhatikan, yaitu kemudahan akses bagi wisatawan, keandalan fasilitas yang tersedia, keamanan yang terjamin, kepercayaan terhadap penyedia layanan, keterbukaan dalam informasi, dan peningkatan berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan destinasi. Dengan prinsip-prinsip ini, pariwisata halal dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan (A. Manan et al., 2023).

Keberhasilan strategi pengembangan pariwisata halal sangat bergantung pada penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti ruang ibadah yang nyaman dan makanan halal yang terjamin kualitasnya. Selain itu, untuk memastikan bahwa destinasi tersebut aman dan sehat bagi pengunjung, prinsip Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (CHSE) harus diterapkan secara konsisten. Hal ini tidak hanya mendukung pengalaman wisata yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata halal dapat beroperasi dengan standar tinggi yang memenuhi ekspektasi pengunjung dan berkontribusi pada keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri (S. Santoso et al., 2021). Pemasaran halal memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi niat beli wisatawan Muslim. Strategi pemasaran yang efektif yang menyoroti elemen-elemen halal dalam produk pariwisata, seperti akomodasi, makanan, dan aktivitas, akan menarik perhatian pasar Muslim yang semakin berkembang.

Selain itu, penawaran perjalanan dan pariwisata yang memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan halal, serta peningkatan kesadaran tentang keberadaan destinasi halal, juga berkontribusi pada keputusan wisatawan untuk memilih tempat tujuan mereka. Pemasaran halal yang tepat akan memastikan bahwa produk pariwisata halal dikenal luas dan diminati (Abrista Devi & I. Firmansyah, 2019).

Kepuasan wisatawan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan lingkungan fisik maupun non-lingkungan. Faktor lingkungan, seperti nilai estetika dan keberlanjutan alam yang dirasakan oleh wisatawan, berkontribusi pada pengalaman yang menyenangkan. Sementara itu, faktor non-lingkungan, termasuk kinerja destinasi yang ramah halal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan citra destinasi halal yang positif, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pengunjung. Ketika semua faktor ini dikelola dengan baik, mereka dapat menciptakan pengalaman yang memuaskan dan mendorong wisatawan untuk berkunjung kembali (N. Zulvianti et al., 2022).

Pengintegrasian elemen-elemen seperti aksesibilitas, fasilitas ramah Muslim, dan keberlanjutan ke dalam rencana pengembangan pariwisata halal akan memperkuat daya tarik destinasi tersebut di mata wisatawan Muslim. Selain meningkatkan jumlah pengunjung, hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa pengembangan tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip Syariah, yang tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tetapi juga memperkuat kedudukan pariwisata halal sebagai sektor yang berkelanjutan dan harmonis dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pengembangan Layanan Pendukung (Ancillary)

Pengembangan Layanan Pendukung (Ancillary) dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Provinsi Jawa Barat

menuju Pariwisata Berkelanjutan. Layanan pendukung (ancillary services) adalah komponen penting dalam industri pariwisata yang mendukung kebutuhan wisatawan selama perjalanan mereka, mulai dari layanan perbankan, informasi wisata, asuransi, hingga transportasi. Dalam konteks pariwisata halal, layanan pendukung memainkan peran krusial karena mereka perlu disesuaikan dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata di destinasi tersebut. Di Provinsi Jawa Barat, pengembangan layanan pendukung yang ramah terhadap wisatawan Muslim menjadi bagian integral dari strategi pariwisata halal, dengan tujuan meningkatkan kepuasan wisatawan dan memastikan bahwa destinasi ini dapat bersaing di pasar pariwisata global.

Dalam pariwisata halal, layanan pendukung mencakup berbagai aspek seperti layanan perbankan syariah, asuransi perjalanan halal, layanan transportasi yang sesuai dengan prinsip halal, hingga penyediaan informasi tentang tempat-tempat yang halal dan ramah Muslim. Menurut Hassan dan Hall (2019), layanan pendukung yang memadai menjadi faktor penting dalam pengalaman wisatawan, terutama wisatawan Muslim yang memiliki kebutuhan khusus terkait halal. Layanan ini mencakup tidak hanya aspek fungsional seperti kemudahan akses dan kenyamanan, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Di Jawa Barat, layanan pendukung yang disediakan di berbagai destinasi wisata mulai disesuaikan untuk memenuhi standar halal. Misalnya, bank-bank di kawasan wisata utama seperti Bandung dan Bogor telah menyediakan layanan perbankan syariah, yang memudahkan wisatawan Muslim dalam melakukan transaksi tanpa harus khawatir melanggar aturan syariah. Selain itu, penyediaan asuransi perjalanan halal menjadi aspek penting yang mulai diperkenalkan untuk memastikan keamanan wisatawan Muslim selama perjalanan, sebagaimana diungkapkan oleh Rahman dan Zailani (2021) dalam *Journal of Islamic Marketing*.

Layanan transportasi juga merupakan bagian penting dari layanan pendukung yang berpengaruh pada kenyamanan wisatawan. Di Jawa Barat, pengembangan transportasi yang mendukung pariwisata halal mencakup penyediaan kendaraan umum dan layanan taksi yang bersih dan nyaman, serta di beberapa daerah, bus wisata halal yang menyediakan fasilitas seperti informasi tentang waktu shalat dan tempat ibadah di sepanjang rute. Zulkifli et al. (2020) dalam jurnal *Indonesian Journal of Tourism* menekankan bahwa layanan transportasi yang halal-friendly menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata halal, terutama bagi wisatawan dari luar negeri yang mencari kemudahan selama perjalanan.

Selain itu, layanan penyewaan kendaraan di beberapa destinasi wisata di Jawa Barat, seperti di Lembang dan Cirebon, mulai menawarkan paket yang dirancang khusus untuk wisatawan Muslim, dengan rute perjalanan yang mencakup lokasi ibadah dan restoran halal, yang menjadikan pengalaman wisata lebih terarah dan sesuai dengan prinsip halal.

Di era digital, ketersediaan informasi yang mudah diakses menjadi elemen kunci dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Layanan teknologi informasi, seperti aplikasi pemandu wisata, platform pemesanan, dan informasi digital tentang destinasi halal, memainkan peran besar dalam memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan Muslim. Di Jawa Barat, beberapa aplikasi lokal telah dikembangkan untuk membantu wisatawan menemukan tempat makan halal, penginapan syariah, dan lokasi ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh Zamani-Farahani dan Henderson (2019). Aplikasi ini tidak hanya memudahkan wisatawan Muslim dalam merencanakan perjalanan mereka, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pariwisata dengan mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses akses informasi. Selain itu, berbagai pusat informasi wisata di destinasi utama seperti Bandung, Pangandaran, dan Puncak juga telah menyediakan layanan yang lebih ramah Muslim, termasuk

penyediaan peta halal dan panduan wisata berbasis syariah. Pembahasan oleh Saputra dan Ramdani (2020) menunjukkan bahwa wisatawan Muslim cenderung lebih puas ketika mereka dapat mengakses informasi yang akurat tentang layanan halal di destinasi yang mereka kunjungi.

Layanan Keuangan dan Perbankan Syariah

Aspek lain dari layanan pendukung yang esensial bagi wisatawan Muslim adalah layanan keuangan, terutama dalam bentuk perbankan syariah dan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip halal. Di Jawa Barat, banyak bank telah menyediakan layanan syariah yang memungkinkan wisatawan Muslim untuk melakukan transaksi tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip agama. Selain itu, ATM syariah telah tersedia di beberapa destinasi wisata utama, yang memudahkan wisatawan Muslim untuk menarik uang tunai atau melakukan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Studi Hussain et al. (2021) menyoroti pentingnya layanan keuangan berbasis syariah dalam mendukung pengalaman wisatawan Muslim, terutama dalam konteks pariwisata halal yang menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek perjalanan. Oleh karena itu, pengembangan layanan keuangan syariah di destinasi wisata di Jawa Barat menjadi salah satu prioritas dalam mendukung daya saing pariwisata halal di wilayah ini.

Keberlanjutan dalam layanan pendukung pariwisata halal di Jawa Barat mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien, integrasi teknologi ramah lingkungan, dan penerapan praktik-praktik yang mendukung pelestarian lingkungan. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk menyediakan informasi kepada wisatawan membantu mengurangi penggunaan kertas dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, transportasi ramah lingkungan, seperti bus wisata berbasis listrik, mulai diterapkan di beberapa daerah untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata.

Studi oleh Buckley (2019) dalam *Sustainability in Tourism* menekankan bahwa destinasi wisata yang berkelanjutan harus memperhatikan bagaimana layanan pendukung dikembangkan agar tidak hanya mendukung kenyamanan wisatawan, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Di Jawa Barat, beberapa inisiatif ramah lingkungan telah diimplementasikan dalam layanan pendukung, seperti program daur ulang di pusat informasi wisata dan penggunaan energi terbarukan di beberapa fasilitas transportasi.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan layanan pendukung di destinasi wisata halal di Jawa Barat adalah kurangnya infrastruktur yang merata di seluruh daerah wisata. Destinasi-destinasi wisata di daerah yang lebih terpencil, seperti Sukabumi dan Garut, masih menghadapi kendala dalam penyediaan layanan pendukung yang sesuai dengan standar halal. Menurut Yusof dan Ismail (2020) dalam jurnal *Journal of Islamic Tourism Studies*, tantangan utama dalam pengembangan layanan pendukung di daerah-daerah terpencil adalah minimnya sumber daya dan keterbatasan regulasi yang mendukung inisiatif pariwisata halal. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk pengembangan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam penyediaan layanan perbankan syariah, transportasi halal, dan teknologi informasi yang dapat menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas.

Pengembangan layanan pendukung yang ramah Muslim merupakan bagian penting dari strategi pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat menuju pariwisata berkelanjutan. Dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim dalam hal layanan transportasi, keuangan, teknologi, dan informasi, destinasi wisata di Jawa Barat dapat meningkatkan daya tarik mereka sebagai tujuan utama wisata halal. Meskipun terdapat tantangan, terutama terkait distribusi infrastruktur yang merata, potensi untuk mengembangkan layanan pendukung yang berkualitas tetap besar, dengan

dukungan dari teknologi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor lingkungan, seperti nilai lingkungan yang dirasakan, dan faktor non-lingkungan, termasuk kinerja destinasi yang ramah halal dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, secara signifikan memengaruhi kepuasan wisatawan di destinasi halal (N. Zulvianti et al., 2022). Atribut daya saing destinasi, khususnya faktor pendukung dan manajemen destinasi, memainkan peran penting dalam membentuk niat wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata halal (Y. Lestari et al., 2022).

Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, yang menggabungkan dimensi geologi, ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, sangat penting untuk menciptakan destinasi wisata yang terkenal (A. Rizal et al., 2020). Penerapan ekosistem pariwisata ramah Muslim di Indonesia membutuhkan fasilitas tambahan seperti tempat ibadah dan makanan halal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (CHSE) (S. Santoso et al., 2021). Temuan ini menyoroti pentingnya perencanaan dan manajemen yang komprehensif dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal yang sukses.

Pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembahasan menunjukkan bahwa faktor lingkungan, seperti nilai lingkungan yang dirasakan oleh wisatawan, serta faktor non-lingkungan, termasuk kualitas destinasi yang ramah halal dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, memiliki dampak besar terhadap tingkat kepuasan wisatawan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola destinasi untuk memperhatikan kedua faktor ini agar dapat meningkatkan pengalaman wisatawan di destinasi halal, yang

pada gilirannya mendukung keberlanjutan industri pariwisata di Indonesia (N. Zulvianti et al., 2022).

Atribut daya saing destinasi, khususnya faktor pendukung seperti infrastruktur dan manajemen destinasi, berperan krusial dalam menentukan niat wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata halal. Pembahasan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu destinasi pariwisata halal sangat bergantung pada kemampuan pengelola destinasi dalam menyusun strategi dan mengelola berbagai aspek pendukung yang ada. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, layanan yang ramah halal, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik destinasi (Y. Lestari et al., 2022).

Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir sangat penting untuk menciptakan destinasi wisata yang terkenal dan dapat diterima oleh wisatawan. Pembahasan ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan dimensi geologi, ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam pengembangan destinasi pesisir. Pembangunan yang mengedepankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat setempat akan menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga dapat dinikmati oleh wisatawan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial. (A. Rizal et al., 2020).

Penerapan ekosistem pariwisata ramah Muslim di Indonesia membutuhkan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan makanan halal, serta penerapan prinsip-prinsip Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (CHSE). Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, sehingga destinasi pariwisata dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Dengan memastikan bahwa standar CHSE terpenuhi, destinasi pariwisata halal di Indonesia dapat lebih menarik bagi wisatawan Muslim, yang semakin menjadi segmen pasar yang berkembang di industri pariwisata global. (S. Santoso et al., 2021).

Pengembangan destinasi pariwisata halal yang sukses sangat bergantung pada perencanaan dan manajemen yang komprehensif. Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang terstruktur dan holistik dalam memastikan bahwa semua aspek, mulai dari fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan, hingga kebijakan-kebijakan yang ramah halal, dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan destinasi pariwisata halal sangat ditentukan oleh kemampuan untuk merencanakan dan mengelola setiap elemen yang terlibat dengan cermat, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan dan berkelanjutan.

Strategi Kolaborasi dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat

Pengembangan destinasi pariwisata halal di Provinsi Jawa Barat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan akademisi. Pendekatan yang sinergis ini memungkinkan pengelolaan sumber daya pariwisata yang lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks pariwisata halal, kolaborasi ini tidak hanya tentang menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dari industri pariwisata di Jawa Barat.

1. Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Halal

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang peranan kunci dalam memfasilitasi kolaborasi untuk pengembangan pariwisata halal. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator, dengan menyediakan regulasi yang mendukung, infrastruktur, serta kebijakan yang mendorong pengembangan destinasi wisata halal. Menurut Ridwan Kamil (2021), pemerintah Jawa Barat telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang berkomitmen untuk mengembangkan layanan halal-friendly. Salah satu contoh kolaborasi adalah kerja sama antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal sertifikasi halal untuk layanan makanan, minuman, dan penginapan.

Dalam pembahasannya, Henderson (2016) juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya mendukung pariwisata halal, tetapi juga mendorong keberlanjutan. Pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata halal, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

2. Kolaborasi dengan Pelaku Usaha

Pelaku usaha di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan penyedia transportasi berperan penting dalam menyediakan layanan halal. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, sebagaimana dikemukakan oleh Zailani et al. (2019), menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam pengembangan pariwisata halal. Di Jawa Barat, sektor swasta didorong untuk berinovasi dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti hotel syariah dan restoran halal. Pelaku usaha juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal sertifikasi halal dan pelatihan sumber daya manusia agar lebih memahami konsep pariwisata halal. Battour dan Ismail (2016) menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendukung pariwisata halal dengan memperhatikan preferensi wisatawan Muslim, mulai dari aspek pelayanan hingga fasilitas halal yang disediakan. Di Jawa Barat, kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan pengusaha besar telah memperkuat jaringan layanan halal, seperti jaringan restoran bersertifikasi halal yang tersebar di Bandung dan sekitarnya, serta hotel yang menyediakan fasilitas ibadah.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal melalui Kolaborasi

Partisipasi komunitas lokal merupakan elemen penting dalam keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata halal. Komunitas lokal tidak hanya menjadi bagian dari pelaku usaha pariwisata, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya dan lingkungan setempat. Menurut Oktaviani dan Nugroho (2020), pengembangan pariwisata halal yang melibatkan komunitas lokal akan lebih berkelanjutan karena adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Di Jawa Barat, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal terlihat dalam inisiatif pengembangan desa wisata halal. Komunitas lokal dilibatkan dalam pengelolaan atraksi wisata berbasis syariah, penyediaan homestay halal, dan produksi kerajinan tangan yang sesuai dengan prinsip halal. Hakim et al. (2018) menekankan bahwa pemberdayaan komunitas lokal

dalam pariwisata halal tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tarik destinasi bagi wisatawan Muslim yang mencari pengalaman autentik dan berbasis nilai-nilai Islam.

4. Kolaborasi dengan Akademisi dan Lembaga Pembahasan

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam pengembangan pariwisata halal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan berdasarkan riset yang solid. Akademisi berperan dalam menyediakan data, analisis, dan rekomendasi terkait tren pariwisata halal, preferensi wisatawan, serta dampak dari pengembangan destinasi terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Rahman dan Zailani (2021) menyebutkan bahwa riset akademik berkontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, terutama dalam memahami dinamika pasar wisata halal yang terus berkembang.

Beberapa universitas di Jawa Barat, seperti Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung, telah berkolaborasi dengan pemerintah dan industri pariwisata dalam melakukan riset terkait pengembangan destinasi wisata halal. Faisal (2018) mencatat bahwa riset akademik membantu meningkatkan efisiensi dalam pengembangan infrastruktur halal dan mendukung penerapan standar internasional dalam layanan pariwisata halal.

5. Kolaborasi Antar Destinasi dan Internasional

Kolaborasi antar destinasi wisata di tingkat regional dan internasional juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan pariwisata halal. Hall (2020) dalam pembahasannya menyatakan bahwa kolaborasi antar destinasi dapat memperluas jaringan promosi dan menciptakan sinergi dalam pengembangan produk pariwisata halal. Jawa Barat telah menjalin kolaborasi dengan beberapa provinsi lain di Indonesia yang memiliki komitmen serupa terhadap pengembangan

pariwisata halal, seperti Sumatera Barat dan Aceh, untuk saling berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengembangkan destinasi halal. Kolaborasi internasional juga menjadi prioritas, terutama dengan negara-negara yang menjadi pasar utama wisata halal seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Khan dan Callanan (2021) menyatakan bahwa kolaborasi internasional tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan layanan halal di sektor pariwisata.

6. Tantangan dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Halal

Meskipun kolaborasi menjadi strategi utama dalam pengembangan pariwisata halal, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari beberapa pemangku kepentingan tentang konsep pariwisata halal yang komprehensif. Henderson (2016) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha dan komunitas lokal yang belum sepenuhnya memahami standar halal dalam sektor pariwisata, sehingga memerlukan pelatihan dan edukasi yang lebih intensif. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkadang berjalan kurang efektif, terutama dalam hal regulasi dan pengawasan. Menurut Battour dan Ismail (2016), kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat menghambat pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif untuk memastikan kolaborasi yang optimal.

Kolaborasi merupakan kunci dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat menuju pariwisata berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan mitra internasional, destinasi wisata halal dapat berkembang secara holistik dan berkelanjutan. Tantangan-

tantangan yang ada harus diatasi dengan peningkatan koordinasi, pemahaman tentang konsep halal, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan.

Strategi Kolaborasi dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang mempertimbangkan adat istiadat setempat, strategi pemasaran, dan pengalaman wisatawan. Pembahasan telah menunjukkan bahwa destinasi wisata halal yang sukses mengintegrasikan fasilitas dan layanan ramah Muslim, seperti tempat ibadah dan pilihan makanan halal (S. Santoso et al., 2021)

Komunikasi pemasaran yang efektif, termasuk pemberdayaan masyarakat dan penggunaan media sosial, memainkan peran penting dalam mempromosikan destinasi tersebut (Dadi Ahmadi et al., 2023). Loyalitas wisatawan dalam pariwisata halal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman halal, nilai yang dirasakan, dan kepuasan, dengan penduduk lokal memiliki dampak paling signifikan terhadap pengalaman wisatawan secara keseluruhan (D. Suhartanto et al., 2020). Namun, penerapan kebijakan pariwisata halal harus memperhitungkan keragaman etnis dan agama di Indonesia, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan untuk berbagai daerah untuk mengakomodasi berbagai norma dan adat istiadat (Intan Purwandani & M. Yusuf, 2024)

Strategi kolaboratif ini memastikan pengembangan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan dengan tetap menghormati nilai-nilai lokal. Pengembangan pariwisata halal di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multifaset, mengingat pentingnya untuk mengintegrasikan aspek adat istiadat lokal, strategi pemasaran, serta pengalaman wisatawan. Pembahasan menunjukkan bahwa destinasi wisata halal yang berhasil sering kali mengadopsi fasilitas yang ramah Muslim, seperti tempat ibadah dan makanan halal, yang memungkinkan para wisatawan untuk merasa nyaman dan

diterima selama berkunjung (S. Santoso et al., 2021). Komunikasi pemasaran yang efektif memainkan peran krusial dalam menarik perhatian wisatawan ke destinasi pariwisata halal. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan masyarakat lokal serta pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan destinasi, yang dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan daya tarik wisata halal di berbagai kalangan (Dadi Ahmadi et al., 2023). Loyalitas wisatawan terhadap pariwisata halal sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama berkunjung, nilai yang dirasakan, serta tingkat kepuasan yang tercipta. Dalam hal ini, peran masyarakat lokal sangat signifikan, karena interaksi mereka dengan wisatawan dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap keseluruhan pengalaman wisatawan (D. Suhartanto et al., 2020).

Namun, dalam merancang kebijakan pariwisata halal, sangat penting untuk mempertimbangkan keragaman etnis dan agama yang ada di Indonesia. Pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat menghormati dan mengakomodasi norma serta adat istiadat setempat tanpa menimbulkan konflik (Intan Purwandani & M. Yusuf, 2024).

Dengan menggabungkan berbagai elemen ini, strategi kolaboratif dapat memastikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal berlangsung secara berkelanjutan, dengan tetap menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Indonesia. Pariwisata halal telah mendapatkan perhatian yang signifikan di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Barat. Pengembangan pariwisata halal menghadapi tantangan seperti kurangnya minat dan pemahaman konsumen terhadap hotel syariah (Suherman, 2018). Implementasi yang sukses membutuhkan kolaborasi bisnis dan rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan (Mudofir et al., 2018). Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang berfokus pada pemasaran, pengembangan destinasi, serta pertumbuhan

industri dan kelembagaan, yang mengarah pada peningkatan peringkat di Global Muslim Travel Index (Sayekti, 2020).

Di Bandung, kekuatannya meliputi dukungan pemerintah, berbagai destinasi wisata, dan fasilitas keagamaan, sementara kelemahannya adalah penyediaan layanan yang kurang optimal. Peluang muncul dari peningkatan akses ke objek wisata, tetapi persaingan dari daerah lain menjadi ancaman (Qory et al., 2021). Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi seperti menyediakan sertifikasi halal, meningkatkan promosi, mengadakan pelatihan, dan mengembangkan produk pariwisata yang unik telah diusulkan (Suherman, 2018; Sayekti, 2020).

Pariwisata halal di Indonesia, terutama di Jawa Barat, telah menjadi fokus perhatian karena potensinya untuk menarik wisatawan muslim baik domestik maupun internasional. Namun, pengembangan sektor ini menghadapi tantangan, termasuk rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap konsep hotel syariah, yang mencakup layanan sesuai prinsip-prinsip Islam seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan aturan operasional tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan promosi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran serta minat konsumen terhadap produk pariwisata halal, sebagaimana diungkapkan oleh Suherman (2018).

Implementasi yang sukses dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata halal, sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Menurut Mudofir et al. (2018), rasa saling percaya menjadi elemen kunci dalam membangun sinergi yang kokoh, memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencakup berbagi informasi, menyelaraskan kepentingan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi komprehensif untuk memperkuat pariwisata halal, meliputi pemasaran, pengembangan destinasi, serta pertumbuhan industri dan kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk

meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, terutama dalam menarik wisatawan muslim. Langkah-langkah tersebut telah memberikan dampak positif, tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia di Global Muslim Travel Index, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim (Sayekti, 2020).

Pariwisata halal di Bandung memiliki kekuatan utama berupa dukungan aktif dari pemerintah, beragam destinasi wisata menarik, serta fasilitas keagamaan yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim. Namun, kelemahan terletak pada layanan yang belum optimal, seperti kualitas pelayanan dan pemenuhan standar halal. Peluang besar muncul dengan adanya peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata, yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Meski demikian, ancaman signifikan berasal dari persaingan dengan daerah lain yang juga mengembangkan pariwisata halal secara agresif, sehingga Bandung perlu terus meningkatkan kualitas dan inovasi dalam sektor ini (Qory et al., 2021).

Menghadapi tantangan dalam pengembangan pariwisata halal, berbagai strategi telah diusulkan untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak wisatawan muslim. Strategi tersebut meliputi penyediaan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan layanan, peningkatan promosi untuk memperluas kesadaran publik, penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku usaha guna meningkatkan kompetensi, serta pengembangan produk pariwisata yang unik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata halal yang lebih kuat dan berkelanjutan (Suherman, 2018; Sayekti, 2020).

Dampak Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal terhadap Pariwisata Berkelanjutan

Dampak Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Jawa Barat. Pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat memiliki

potensi besar dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki sumber daya alam dan budaya yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Namun, untuk mencapai keberlanjutan, pengembangan ini harus dilakukan secara terstruktur, memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan Pendapatan dan Diversifikasi Usaha

Salah satu dampak utama pengembangan destinasi pariwisata halal adalah peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata. Menurut Battour dan Ismail (2016), destinasi halal dapat menarik segmen wisatawan Muslim yang terus berkembang secara global, terutama dari negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Dampaknya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pengeluaran mereka selama berwisata di Jawa Barat.

Selain itu, pengembangan pariwisata halal dapat mendorong diversifikasi usaha lokal, terutama dalam sektor kuliner, akomodasi, dan produk kerajinan. Henderson (2016) mencatat bahwa banyak pelaku usaha lokal yang beralih ke penyediaan produk halal karena adanya permintaan tinggi dari wisatawan Muslim. Di Jawa Barat, destinasi seperti Bandung, Lembang, dan Bogor telah menunjukkan peningkatan dalam jumlah restoran bersertifikat halal, hotel syariah, serta penyedia jasa transportasi yang ramah Muslim, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal.

2. Dampak Lingkungan: Pemeliharaan Alam dan Pengelolaan Sumber Daya

Pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat juga mendorong praktik-praktik pelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Salah satu aspek penting dalam pariwisata halal adalah ajaran Islam tentang menjaga

keseimbangan alam dan tidak merusak lingkungan. Buckley (2019) menyatakan bahwa destinasi wisata halal sering kali mengintegrasikan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang baik, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan energi terbarukan. Contohnya, beberapa destinasi wisata alam di Jawa Barat, seperti Kawah Putih dan Pantai Pangandaran, telah menerapkan kebijakan pariwisata hijau, dengan membatasi jumlah pengunjung dan menyediakan fasilitas daur ulang. Hal ini sejalan dengan pembahasan Rahman et al. (2021) yang menyoroti bahwa wisatawan Muslim cenderung mendukung praktik pariwisata berkelanjutan yang menghormati alam.

3. Dampak Sosial: Pemberdayaan Komunitas Lokal dan Pelestarian Budaya

Pengembangan destinasi pariwisata halal juga berdampak positif pada pemberdayaan komunitas lokal. Menurut Oktaviani dan Nugroho (2020), kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi halal meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Di Jawa Barat, komunitas lokal terlibat dalam pengelolaan homestay halal, pembuatan kerajinan tangan, dan penyediaan layanan transportasi halal-friendly, yang semuanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Selain itu, pariwisata halal berperan penting dalam pelestarian budaya lokal. Banyak destinasi wisata halal yang mengintegrasikan elemen budaya Islam dalam atraksi wisata, seperti seni, kuliner, dan festival lokal. Menurut Zailani et al. (2019), pariwisata halal membantu mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal yang berakar pada Islam, yang pada gilirannya memperkuat identitas masyarakat lokal dan menarik wisatawan yang mencari pengalaman autentik.

4. Dampak Keberlanjutan: Mengurangi Ketimpangan dan Memperluas Akses

Pengembangan destinasi halal di Jawa Barat juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang, seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi, mulai menarik perhatian wisatawan melalui pengembangan desa wisata halal. Zamani-Farahani dan Henderson (2019) mencatat bahwa wisatawan Muslim, terutama dari Timur Tengah, cenderung mencari destinasi yang menawarkan kedamaian dan keselarasan dengan alam, yang umumnya ditemukan di daerah pedesaan.

Selain itu, destinasi wisata halal juga memperluas akses pariwisata bagi segmen wisatawan Muslim yang sebelumnya kurang terlayani. Hal ini sejalan dengan Prayag (2020), yang menunjukkan bahwa destinasi halal yang ramah Muslim cenderung lebih inklusif, tidak hanya dalam hal fasilitas fisik tetapi juga dalam menyediakan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun dampak positifnya signifikan, pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya standar halal yang komprehensif. Henderson (2016) menyatakan bahwa banyak pelaku usaha masih belum memahami sepenuhnya konsep halal dalam pariwisata, sehingga diperlukan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif.

Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama di destinasi yang menarik banyak wisatawan. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem bisa terjadi. Buckley (2019) menyarankan bahwa regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di destinasi wisata.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan akademisi merupakan faktor penting dalam mencapai pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan destinasi halal. Menurut Ridwan Kamil (2021), pemerintah Jawa Barat telah

mengimplementasikan berbagai program kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa pariwisata halal berkembang secara berkelanjutan.

Pembahasan oleh Faisal (2018) menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan destinasi memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Kolaborasi juga penting dalam hal pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan destinasi halal, yang dapat ditingkatkan melalui kemitraan internasional dengan negara-negara yang lebih dulu sukses mengembangkan pariwisata halal, seperti Malaysia dan Turki.

Pembahasan yang dirujuk oleh Zulvianti et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kepuasan wisatawan di destinasi halal:

1. Faktor Lingkungan: Nilai lingkungan yang dirasakan, seperti keindahan alam, kebersihan, dan pelestarian lingkungan di destinasi, memberikan pengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan. Wisatawan cenderung merasa puas jika destinasi menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
2. Faktor Non-Lingkungan:
 - a. Termasuk kinerja destinasi yang ramah halal, misalnya ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan Muslim (seperti makanan halal, area ibadah, dan etika pelayanan).
 - b. Upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang mencakup keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan destinasi dapat terus berkembang tanpa merusak sumber daya alam atau budaya lokal.

Tantangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Dan Strategi Untuk Mencapai Pariwisata Berkelanjutan

A. Tantangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Pengembangan atraksi atau daya tarik wisata di Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam konteks pariwisata halal, menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Tantangan ini mencakup aspek regulasi, infrastruktur, standar halal, serta adaptasi budaya lokal terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Pemerintah provinsi Jawa Barat harus memiliki strategi yang tepat, karena potensi provinsi Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata halal berkelanjutan dapat diwujudkan, mengingat kekayaan alam, budaya dan keberagaman sosialnya.

1) Kurangnya Pemahaman dan Edukasi tentang Standar Halal

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang standar halal yang berlaku dalam pengembangan daya tarik wisata. Menurut Henderson (2016), banyak pengelola atraksi wisata yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan wisatawan muslim, baik dari segi fasilitas maupun layanan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara ekspektasi wisatawan muslim dengan pengalaman yang mereka terima di destinasi.

2) Keterbatasan Infrastruktur Penunjang

Meskipun Jawa Barat memiliki banyak atraksi alam dan budaya yang menarik, keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti fasilitas ibadah dan layanan transportasi yang ramah Muslim, masih menjadi kendala. Battour dan Ismail (2016) menekankan bahwa

aksesibilitas yang kurang memadai, seperti kurangnya mushola atau restoran halal di sekitar atraksi, dapat menurunkan daya tarik wisata halal secara keseluruhan.

3) Adaptasi Budaya Lokal

Tantangan lainnya adalah adaptasi budaya lokal terhadap konsep pariwisata halal. Beberapa komunitas lokal mungkin kurang memahami atau belum siap untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan wisata mereka. Oktaviani dan Nugroho (2020) menyoroti bahwa meskipun terdapat potensi besar, resistensi budaya atau minimnya kesadaran terhadap pariwisata halal dapat menghambat pengembangannya.

4) Sertifikasi dan Pengawasan Halal

Proses sertifikasi halal yang rumit dan pengawasan yang tidak konsisten juga menjadi tantangan dalam memastikan atraksi wisata benar-benar memenuhi standar halal. Rahman et al. (2021) mencatat bahwa ketidakkonsistenan dalam proses sertifikasi dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wisatawan dan mengurangi kepercayaan terhadap destinasi wisata halal.

5) Persaingan dengan Destinasi Lain

Persaingan dengan destinasi lain yang juga mengembangkan pariwisata halal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Malaysia dan Turki, menambah tantangan bagi Jawa Barat dalam membangun citra sebagai destinasi utama wisata halal. Khan dan Callanan (2021) menyatakan bahwa persaingan global dalam pariwisata halal membutuhkan strategi diferensiasi yang jelas.

B. Strategi untuk Mengatasi Tantangan dan Mencapai Pariwisata Berkelanjutan

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran tentang Pariwisata Halal

Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi kepada para pengelola destinasi dan masyarakat lokal mengenai pentingnya pariwisata halal. Menurut Zamani-Farahani dan

Henderson (2019), program pelatihan dan sosialisasi tentang standar halal dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di atraksi wisata. Ini mencakup pelatihan tentang sertifikasi halal, pengelolaan fasilitas ibadah, serta layanan ramah Muslim yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

2. Penguatan Infrastruktur yang Mendukung Pariwisata Halal

Pengembangan infrastruktur fisik yang mendukung wisata halal, seperti mushola yang mudah diakses, fasilitas wudhu yang bersih, dan restoran bersertifikat halal di sekitar atraksi wisata, sangat penting untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Buckley (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung kenyamanan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan destinasi berjalan secara berkelanjutan.

3. Kolaborasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Lokal

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mencapai keberlanjutan. Ridwan Kamil (2021) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan destinasi wisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memainkan peran penting dengan menyediakan regulasi yang jelas, insentif bagi usaha pariwisata halal, serta membangun kemitraan strategis dengan pelaku industri dan komunitas.

4. Sertifikasi Halal yang Transparan dan Konsisten

Penguatan sistem sertifikasi halal yang transparan dan mudah diakses akan membantu meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata halal di Jawa Barat. Rahman et al. (2021) menekankan bahwa sistem sertifikasi halal yang konsisten dan terpercaya dapat memperkuat citra destinasi sebagai tempat yang ramah bagi wisatawan Muslim. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal

untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

5. Inovasi dalam Pengembangan Produk Wisata Halal

Untuk menghadapi persaingan, diperlukan inovasi dalam pengembangan produk wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan Muslim. Khan dan Callanan (2021) menyoroti pentingnya pengembangan produk wisata halal yang unik dan berbeda, seperti pengalaman spiritual yang terintegrasi dengan wisata alam, program wisata religi, serta promosi budaya lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Pemasaran dan Promosi yang Terarah

Strategi pemasaran dan promosi yang tepat akan membantu meningkatkan visibilitas Jawa Barat sebagai destinasi wisata halal. Zailani et al. (2019) menyarankan penggunaan platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar wisata halal global. Selain itu, promosi destinasi harus menyertakan keunggulan-keunggulan unik Jawa Barat, seperti keberagaman budaya, alam, dan kekayaan kuliner halal yang dapat dinikmati oleh wisatawan Muslim.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z., Ismail, S., & Rashid, R. (2020). Challenges of sustainable tourism development in developing countries: Evidence from halal tourism. *Sustainability*, 12(9), 390-403.
- Ahmadi, D., Sulaiman, A.I., Runtiko, A.G., Noegroho, A., Raqi, R.I., Maryani, A., Yuniati, Y., & Yulianita, N. (2023). Marketing Communications for Tourism Development in Ecoethno Leadcamp Site. *Studies in Media and Communication*.
- Aji, P., Prawira, I., & Suryana, W. (2020). Teknologi Remote
- Al-Ansi, A., & Han, H. (2019). Role Of Halal-Friendly Destination Performances In Destination Loyalty: Evidence From Muslim Travelers. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 1-18.
- Amalia, F.A., Nova, M., Koh, C., & Suhartanto, D. (2024). Sustainable development in halal tourism industry: The role of innovation and environmental concern. *E3S Web of Conferences*.
- Andrianto, Tomy dan Gima Sugiana, The Analysis of Potential 4As Tourism Component in the Selasari Rural Tourism, Pangandaran, West Java, *Proceedings of the Asia Tourism Forum 2016 - the 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia*, May, 2016.
- Ardiansyah, Imam dan Stephanie Fortuna, Analysis of Visitor Attraction with the 4A Approach (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) in SnowBay Waterpark TMII, Jakarta, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (Journal of Business and Entrepreneurship)* 8, no. 2, 2020.
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2023). Pathways toward the Transformation of Sustainable Rural Tourism Management in Central Java, Indonesia. *Sustainability*.
- Asian Disaster Preparedness Center. (2021). Climate Risk
- Badan Geologi Indonesia. (2019). Laporan Kegiatan Badan Geologi Indonesia. (2020). Kondisi Geografi dan Topografi Provinsi Jawa Barat.

- Badan Geologi Indonesia. (2020). Peta Geologi Provinsi Jawa Barat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Badan Informasi Geospasial. (2020). Pemetaan Topografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. BIG Press.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2021). Fenomena Cuaca Ekstrem di Indonesia: Laporan Tahunan. BMKG.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2023). Laporan Iklim Indonesia 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). Provinsi Jawa Barat dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2021). Statistik Daerah Jawa Barat. Badan Pusat Statistik.
- Battaglia, M, Sustainability in the Tourism Business, *Symphonya Emerging Issues in Management*, no. 3, 2017.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- Battour, M., et.al, Halal tourism: exploring innovative marketing opportunities for entrepreneurs, *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 4, 2021. doi: <http://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0191>.
- Battour, M., Ismail, M.N., & Battor, M. (2018). The Impact of Destination Attributes on Muslim Tourist's Choice. *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 1, 6-18.
- Bintang Irawan Sarpingi, diwawancarai Alvien SH dan A Ghani, 04 Oktober 2024, Kantor HPI Jawa Barat.
- Boğan, E., & Sarıışık, M. (2019). Halal tourism: conceptual and practical challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 87-96.
- Buckley, R. (2019). Sustainability And Tourism: The Future of Tourism, Hospitality, And Events. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(5), 732-746.

- Buckley, R. (2019). Sustainability In Tourism: Impacts And Benefits. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(5), 732-746.
- Chen, Y., & Wu, S. (2021). An exploration of actor-network theory and social affordance for the development of a tourist attraction: A case study of a Jimmy-related theme park, Taiwan. *Tourism Management*, 82, 104206.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Profil Provinsi Jawa Barat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Profil Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2019). Developing halal travel and halal tourism to promote economic growth: A confirmatory analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 193-214.
- Dina Sudjana, diwawancarai Alvien Septian Haerisma, 12 Oktober 2024, Guest House UIN SSC.
- DinarStandard. (2020). State of the Global Islamic Economy Report. Thomson Reuters & DinarStandard.
- Dugonjić, A., & Uršulin-Trstenjak, N. (2022). Halal tourism vs sustainable tourism. *Ekonomski izazovi*.
- Dugonjić, A., & Uršulin-Trstenjak, N. (2022). Halal tourism vs sustainable tourism. *Ekonomski izazovi*.
- Duman, T. (2020). The Role of Halal Tourism In Achieving Sustainable Development Goals. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 45-63.
- Fahrur Rosidi, diwawancarai Alvien Septian Haerisma, 03 Oktober 2024, Kantor GIPI Prop. Jawa Barat, Bandung
- Faisal, R. (2018). Peran Riset Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Tourism Studies*, 7(1), 20-30.
- Fatimah, N., et al. (2021). Halal Tourism Infrastructure Development in West Java. *Jurnal Pariwisata Halal Indonesia*, 5(2), 45-62.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Firmansyah, D. & Sari, Y. (2021). Potensi Wilayah dan Tantangan Geografis Jawa Barat dalam Pembangunan. *Journal of Regional Development*, 15(2), 99-107.
- Firmansyah, D., & Rahmawati, N. (2019). Coastal Erosion and Adaptation Strategies in Southern Java: A Case Study of West Java. *Journal of Coastal Research*, 35(3), 569-577.
- H.B Sutopo, *Metodologi Pembahasan Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
- Hakim, L., Nugroho, I., & Yulianda, F. (2018). Community Involvement In The Development of Halal Tourism: The Case of West Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(8), 1232-1248.
- Hall, C. M. (2020). Collaboration and partnerships in sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(3), 304-322.
- Hanifah, I., & Abdullah, A. (2020). The Importance of Halal-Friendly Infrastructures for Muslim Tourists: A Case Study In West Java, Indonesia. *Indonesian Journal of Tourism and Hospitality*, 9(3), 15-28.
- Hariato, S.P., Masruri, N.W., Winarno, G.D., Tsani, M.K., & Santoso, T. (2020). Development Strategy for Ecotourism Management Based On Feasibility Analysis Of Tourist Attraction Objects And Perception Of Visitors And Local Communities. *Biodiversitas*, 21, 689-698.
- Haryanto, T. (2020). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Jawa Barat: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan*, 15(1), 34-49.
- Henderson, J.C. (2016). Halal Food, Certification, and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160-164.
- Henderson, J. C. (2019). Halal Tourism in Southeast Asia. *Tourism Management*, 74, 232-241.

- Heni Hendrayani, diwawancarai Alvien Septian Haerisma dan A. Ghani, 05 Oktober 2024, Disbudpar Prov. Jawa Barat
- Hermanto, B., & Nugroho, A. (2020). Seismisitas dan Risiko Gempa di Jawa Barat. *Jurnal Seismologi Indonesia*, 12(3), 112-126.
- Hermanto, Y., & Dewi, S. (2020). Infrastructure Development and Accessibility In Supporting Halal Tourism In West Java. *Indonesian Tourism Journal*, 8(2), 25-40.
- Hidayat, R., & Nurhayati, R. (2020). Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 97-110.
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, & Hidayat, S. (2020). Problem and Solution Models for Halal Tourism Development in West Java. *KnE Social Sciences*, 708–720.
- Hussain, M., Zailani, S., & Musa, G. (2021). The importance of sharia-compliant services in Islamic tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 654-671.
- Ilmi, H., & Ambariyanto, A. (2024). Does Halal Tourism Development Support Achievement of SDGs Goals? A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 85-95.
- Ismail, T., & Rohman, F. (2019). The Role of Attraction, Accessibility, Amenities, and Ancillary on Visitor Satisfaction and Visitor Attitudinal Loyalty of Gili Ketapang Beach. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 12(2), 149-165.
- Kementerian Pariwisata. (2021). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Khan, M. A., & Callanan, M. (2021). International Collaboration In Halal Tourism: Challenges and Opportunities. *International Journal of Tourism Studies*, 15(2), 211-225.
- Kudsi, Ibrahim dan Puspita Sari Sukardani, *Friendly Lombok: Destination Branding* (Pulau Lombok Sebagai Upaya Untuk Mempromosikan Pariwisata), *Jurnal Commercium* 1, no.1, 2018.

- Kuswoyo, B. (2021). Peran Industri Manufaktur di Jawa Barat dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economic Development*, 9(3), 57-68.
- Lahny, M. A. (2019). Halal Recreation Potential In Indonesia In Improving Tourists And The Global Economy.
- Lestari, Y. D., Saidah, F., & Putri, A. N. A. (2022). Effect of destination competitiveness attributes on tourists' intention to visit halal tourism destination in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 937-965.
- Manan, A., Wirianto, D., Fadhillah, M. A., & Kamarullah, K. (2023). Halal tourism: A proposed Sharia model for implementation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 81-100.
- Mastercard - CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 Report.
- Mastercard – CrescentRating, Bank Indonesia dan Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia – Indonesia Muslim Travel Index 2023 Report.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137-143.
- Mudofir, M., Susilo, P., DIHARTO, A. K., Muafi, M., & Badawi, B. (2018). The development of halal ecotourism destination. Context of business collaboration and mutual trust. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9(2), 325-333.
- Mursid, A., & Anoraga, P. (2022). Halal Destination Attributes and Revisits Intention: The Role of Destination Attractiveness And Perceived Value. *International Journal of Tourism Cities*, 8(2), 513-528.
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15-42.

- Navarro-Ruiz, S., & Mckercher, B. (2020). The Usability of Visitor Attractions: State-Of-The-Art. *Tourism Review*, 75, 497-509.
- Nugraha, A., & Azis, A. (2021). Cultural Tourism and Local Wisdom: An Exploration of Sustainable Halal Tourism in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 825-840.
- Nugraha, A., & Azis, A. (2021). Dampak Pariwisata terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 13(1), 45-60.
- Nugroho, B. & Riyanto, S. (2021). Analisis Kerentanan Tanah Longsor di Jawa Barat Menggunakan GIS. *Jurnal Mitigasi Bencana*, 5(1), 88-97.
- Nugroho, W. (2020). Sertifikasi Halal dalam Pariwisata: Tinjauan Terhadap Implementasi di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pariwisata Indonesia*, 8(3), 122-135.
- Nurul Huda, Nova Rini, Muslikh, and Slamet Hidayat, (2020), Problem and Solution Models for Halal Tourism Development in West Java in *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, KnE Social Sciences, pages 708–720. doi: 10.18502/kss.v4i14.7929.
- Oktadiana, H., Pearce, P.L., & Chon, K.K. (2020). Muslim Travellers' Needs: What Don't We Know?. *Tourism Management Perspectives*, 35, 100675.
- Oktaviani, D., & Rahmawati, F. (2021). The Importance Of Spiritual Accessibility In Developing Halal Tourism In Indonesia. *Journal of Islamic Tourism Studies*, 6(1), 12-30.
- Oktaviani, D., & Ramdhan, A. (2021). Halal Tourism Development In Indonesia: Challenges and Opportunities In West Java. *Journal of Indonesian Tourism Studies*, 4(2), 67-79.
- Oktaviani, R., & Nugroho, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Halal. *Jurnal Pengembangan Pariwisata Indonesia*, 10(4), 245-258.
- Öztüren, A., Kilic, H., Olorunsola, V. O., & Osumeje, B. O. (2021). Managing natural tourism attractions based on

- visitor reviews: a case study of Golden Beach, Karpaz. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 13(4), 535-544.
- Pamukcu, H., & Sariisik, M. (2021). Suggestions for standardization of halal tourism in hospitality industry. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 389-407.
- Pangestu, R., & Wijaya, I. (2019). Urbanisasi dan Dampaknya terhadap Struktur Sosial Masyarakat Jawa Barat. *Jurnal Sosial Indonesia*, 7(1), 23-35.
- Pasarela, H., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Halal Tourism Development Strategy in Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 9(1), 14-26.
- Perbawasari, S., Sjuchro, D. W., Setianti, Y., Nugraha, A. R., & Syamsu, Y. (2020). Information Literacy in Halal Tourism in Bandung Regency, West Java, Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1).
- Prayag, G. (2020). Halal Tourism: A New Era of Growth and Opportunity. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 565-578.
- Priyono, O. Andri, Halal Tourism Opportunities and Challenges in East Java, *Jurnal Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2, Desember 2018, doi: <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3479>.
- Purwandani, I., & Yusuf, M. (2024). Localizing Indonesian Halal tourism policy within local customs, Qanun, and marketing. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 16(2), 246-264.
- Qory, S., Ulya, S., Royani, W., & Dewi, Y. (2021). Destinasi pariwisata halal di Kota Bandung. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 99-106.
- Rahardjo, M. (2021). Transformasi Sosial Budaya di Jawa Barat: Sebuah Tinjauan Antropologis. *Buku Ilmu Sosial dan Budaya*, 3(2), 112-126.

- Rahman, A., & Zailani, S. (2017). The Influence of Tourism Growth on The Sustainability Of Halal Destinations. *Journal of Islamic Marketing*, 8(3), 393-408.
- Rahman, M. K., & Zailani, S. (2021). Halal Tourism: Development, Challenges, And Opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 223-241.
- Rahman, M. K., Zailani, S., & Musa, G. (2021). Accessibility and Inclusion In Muslim-Friendly Tourism: A Case Study In Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 543-560.
- Rahman, M., Moghavvemi, S., Thirumoorthis, T., & Rahman, M.K. (2020). The Impact of Tourists' Perceptions On Halal Tourism Destination: A Structural Model Analysis. *Tourism Review*, 75, 575-594.
- Rasyid, Sustainable Development of Halal Tourism in Indonesia: Opportunities and Challenges, *The proceedings of the 1st Workshop Multimedia Education, Learning, Assessment and its Implementation in Game and Gamification WoMELA-GG* in Medan Indonesia, January 26 – 28, 2019.
- Ridwan Kamil. (2021). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Bappeda Jawa Barat Journal*, 3(2), 15-20.
- Riza, R. (2022). Religious Tourism: Promoting Islamic Values Through Halal Tourism Development In West Java. *Journal of Halal Tourism Studies*, 7(1), 40-55.
- Rizal, A., Apriliani, I.M., & Permana, R. (2020). Sustainability Assessment of Coastal Development In Southern Region Of West Java Province, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 30, 808-817.
- Sahida, W., Razzaq, A., & Hall, C.M. (2019). Halal Tourism: Developing The Competitive Advantage In The Hospitality And Tourism Industry. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 43(3), 522-542.
- Samadikun, D., & Wulandari, R. (2020). Modernisasi Pertanian di Jawa Barat: Tantangan dan Peluang. *Journal of Agricultural Innovation*, 14(2), 78-92.

- Samori, Z., Salleh, N.Z.M., & Khalid, M.M. (2016). Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131-136.
- Santoso, S., Hadibrata, B., Nurhidajat, R., Widyanty, W., Fatmawati, A. A., Ubaidillah, R., & Isa, S. M. (2023). Study on Development Strategies of Muslim-Friendly Tourism Ecosystem. *Available at SSRN 3875184*.
- Sari, S.R., Hilmy, M.F., & Murti, N.K. (2022). Accessible Tourism Perspective in Tourist Destination of Dusun Semilir, Indonesia. *Journal of Design and Built Environment*. 22(2), 21-36.
- Satria, D., & Wibowo, J. M. (2021). Big Data Analysis Of Sustainable Tourism Competitiveness In East Java Province. *Academica Turistica*, 14(2), 189-203.
- Sayekti, N. W. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159-172.
- Sayuti, Marini. Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia. *Kneks go.id*, diakses 06 Juni 2023, <https://kneks.go.id/berita/569>.
- Setiawan, D., Wijaya, A., & Kusnadi, E. (2020). Struktur Geologi Pegunungan Selatan Jawa Barat: Sebuah Tinjauan Tektonik. *Journal of Indonesian Geosciences*, 8(1), 15-25.
- Siregar, D. S. (2018). Perceptions and preferences of muslim domestic tourists in Indonesia as a halal tourism destination (case study: Halal tourism in West Java). *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 4(5), 194-202.
- Siringoringo, H., & Simanjuntak, R. (2021). Pengelolaan Daerah Pesisir di Jawa Barat. *Jurnal Geografi Indonesia*, 39(2), 120-132.
- Sodawan, A., & Hsu, R. L. W. (2022). Halal-friendly attributes and Muslims' visit intention: Exploring the roles of perceived value and destination trust. *Sustainability*, 14(19), 12002.

- Suhartanto, D., Dean, D.L., Wibisono, N., Astor, Y., Muflih, M., Kartikasari, A., Sutrisno, R., & Hardiyanto, N. (2020). Tourist experience in Halal tourism: what leads to loyalty? *Current Issues in Tourism*, 24, 1976 - 1990.
- Suherman, U. D. (2018). Analysis of Strategy for Development of Halal Tourism Potentials in Syariah Hotels in West Java. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 1-15.
- Suherman, D., & Riyadi, T. (2020). Dampak Ekonomi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pangandaran terhadap Perekonomian Lokal. *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(2), 78-92.
- Sunaryo, Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Suryana, A., & Wibowo, D. (2019). Urbanisasi dan Dinamika Perubahan Sosial di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(1), 32-45.
- Sutopo, A., Hidayat, F., & Zain, R. (2020). Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah di Puncak, Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 213-227.
- Taufik, M., & Subardjo, P. (2020). Aktivitas Vulkanik di Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Lingkungan. *Jurnal Vulkanologi Indonesia*, 25(1), 15-24.
- Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2006). Heritage tourism in the 21st century: Valued traditions and new perspectives. *Journal of heritage tourism*, 1(1), 1-16.
- Tjia, H. (2020). Geologi Jawa Barat: Dinamika dan Potensi Sumber Daya. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Utama, A.R. (2020). Pengelolaan Wilayah Pesisir di Jawa Barat: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Lingkungan*, 12(4), 432-440.
- Utama, A.R. (2020). Penggunaan Peta Topografi untuk Perencanaan Tata Ruang di Jawa Barat. *Jurnal Tata Ruang Indonesia*, 10(2), 45-59.

- Utama, A.R. (2021). Pembangunan Wilayah Pesisir Jawa Barat: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Lingkungan*, 13(1), 33-45.
- Wahab, Salah, *Sustainable Tourism in The Developing World in Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability*. London: Routledge, 1997.
- Wibawa, B. M., Pranindyasari, C., Bhawika, G. W., & Mardhotillah, R. R. (2021). Discovering the importance of halal tourism for Indonesian Muslim travelers: perceptions and behaviors when traveling to a non-Muslim destination. *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), 61-81.
- Winarti, Oktifani, Halal Tourism in Indonesia: Does it attract only Muslim Tourists, *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no. 3, November 2017, doi: <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.139>.
- World Meteorological Organization. (2022). State of Climate in Asia 2021. World Meteorological Organization.
- Yudhistira, R. (2021). Infrastruktur Pariwisata dan Dampaknya terhadap Pengembangan KSPD Pangandaran. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 88-105.
- Yuliaty, Tetty. Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia. *Disertasi*, Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Zaenuri, Muchamad, dkk, Halal Tourism Concepts and Policies: Case in West Nusa Tenggara, *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020 – Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS)*, 2021.
- Zaenuri, Muchamad, dkk, Implementation of Development Strategy for Halal Tourism Destinations, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 10, no. 1, Januari 2022.
- Zailani, S., Musa, M., & Shafie, S. (2019). Strategic Collaboration In Halal Tourism: A Case Study of Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Tourism*, 8(1), 53-65.

- Zamani-Farahani, Z., & Henderson, J. C. (2019). Islamic Tourism and Managing Tourism Development In Islamic Societies: The Case Of Iran. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(6), 845-862.
- Zulkifli, A.R., Mohd, M., & Halim, M.A.A. (2020). Halal Tourism: Practical Perspectives and Future Direction. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 4(2), 109-117.
- Zulkifli, S., Mohamad, R., & Halim, A. (2020). The role of transportation in enhancing halal tourism. *Indonesian Journal of Tourism*, 12(2), 201-215.
- Zulvianti, N., Aimon, H., & Abror, A. (2022). The influence of environmental and non-environmental factors on tourist satisfaction in halal tourism destinations in West Sumatra, Indonesia. *Sustainability*, 14(15), 9185.

Pariwisata halal bukan sekadar tren, melainkan jalan menuju keberlanjutan. Buku ini menawarkan panduan strategis dalam merancang destinasi halal berkelas dunia, mulai dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, hingga kolaborasi lintas sektor. Sebuah bacaan inspiratif bagi generasi yang ingin melihat pariwisata Indonesia tumbuh berdaya saing global dan tetap menjaga nilai-nilai keberlanjutan.



ISBN 978-623-89200-5-1



9

786238

920051